



BAB II

KONDISI UMUM

DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**





BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara**. Pembentukan kabupaten ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Pulau Taliabu merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Sejak terbentuk sebagai kabupaten, **Bobong** ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Kabupaten Pulau Taliabu berada di bagian selatan Provinsi Maluku Utara dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau utama dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Letak geografis tersebut memberikan posisi yang strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi geografis yang didominasi wilayah kepulauan menyebabkan biaya transportasi dan logistik relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, sehingga memengaruhi dinamika pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam dan menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan daerah. Potensi tersebut meliputi sektor perikanan tangkap dan budidaya, pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta sumber daya mineral dan pertambangan. Selain itu, kekayaan ekosistem pesisir dan laut yang dimiliki juga memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi biru (*blue economy*), industri berbasis sumber daya lokal, serta sektor pariwisata bahari yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Apabila dikelola secara optimal melalui peningkatan nilai tambah, hilirisasi produk, inovasi teknologi, dan penguatan investasi, berbagai potensi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping potensi yang dimiliki, Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan tersebut antara lain masih terbatasnya infrastruktur dasar, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, rendahnya produktivitas beberapa sektor ekonomi, keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta terbatasnya kesempatan kerja produktif. Kondisi tersebut berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masih relatif tingginya tingkat kemiskinan dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hilirisasi komoditas unggulan, perluasan akses terhadap pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi strategi penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih **maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan** sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.



2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai karakteristik fisik, kewilayahan, dan lingkungan yang memengaruhi dinamika pembangunan. Analisis geografi mencakup berbagai aspek, antara lain letak geografis, luas wilayah, batas administrasi, topografi, kondisi iklim, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Karakteristik geografis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kondisi wilayah, sekaligus menentukan arah pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi geografis memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah. Letak geografis serta karakteristik bentang alam akan memengaruhi pola persebaran penduduk, sistem transportasi, konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur dasar, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Di samping itu, kondisi geografis juga menentukan struktur perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, baik pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, maupun sektor pariwisata berbasis potensi lokal.

Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis yang berbeda, seperti dataran rendah, pegunungan, kawasan pesisir, wilayah kepulauan, maupun kawasan perkotaan dan perdesaan. Perbedaan karakteristik tersebut menghasilkan potensi pembangunan yang beragam sekaligus menghadirkan tantangan yang berbeda dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Wilayah kepulauan, misalnya, umumnya memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, namun sering menghadapi kendala berupa keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Sebaliknya, wilayah daratan dengan aksesibilitas yang lebih baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar dalam pengembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Selain berperan sebagai penentu potensi ekonomi daerah, aspek geografi juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana alam, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi geografis menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*), tangguh terhadap bencana (*resilient development*), dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana tanpa mengurangi daya dukung lingkungan.

Dalam konteks **Kabupaten Pulau Taliabu**, karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan memberikan peluang yang besar bagi pengembangan sektor perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, pariwisata bahari, serta ekonomi berbasis sumber daya alam. Namun demikian, kondisi geografis tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan aksesibilitas antarwilayah, tingginya biaya transportasi dan distribusi, serta belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, analisis aspek geografi menjadi landasan penting dalam penyusunan **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**, karena karakteristik wilayah akan sangat memengaruhi strategi pembangunan, penetapan lokasi prioritas intervensi, serta perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibu kota pemerintahan berada di Bobong.

Secara administratif, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki luas wilayah sekitar $\pm 4.500 \text{ km}^2$ yang terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah administratif Kabupaten Pulau Taliabu terbagi menjadi 8 kecamatan dan sejumlah desa yang tersebar di wilayah kepulauan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebagai berikut:



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Secara geografis, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang didominasi oleh bentang alam berupa perbukitan, kawasan hutan, serta wilayah pesisir yang mengelilingi sebagian besar daratan. Kondisi topografi yang bervariasi tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata bahari. Di sisi lain, karakteristik geografis tersebut juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan karena menyebabkan sebagian wilayah, khususnya daerah pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil, masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas serta belum meratanya penyediaan infrastruktur dasar.

Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tingginya biaya transportasi dan logistik akibat kondisi kepulauan juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat serta tingkat daya saing wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, jaringan jalan, pelabuhan, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana dasar lainnya menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, karakteristik wilayah yang didominasi kawasan hutan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki fungsi ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun demikian, kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan dampak perubahan iklim.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Secara geografis, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang didominasi oleh bentang alam berupa perbukitan, kawasan hutan, serta wilayah pesisir yang mengelilingi sebagian besar daratan. Kondisi topografi yang bervariasi tersebut memberikan potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata bahari. Di sisi lain, karakteristik geografis tersebut juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan karena menyebabkan sebagian wilayah, khususnya daerah pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil, masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas serta belum meratanya penyediaan infrastruktur dasar.

Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tingginya biaya transportasi dan logistik akibat kondisi kepulauan juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat serta tingkat daya saing wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, jaringan jalan, pelabuhan, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana dasar lainnya menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, karakteristik wilayah yang didominasi kawasan hutan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki fungsi ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun demikian, kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan salah satu faktor fisik dasar yang memiliki pengaruh strategis terhadap proses perencanaan dan pengembangan wilayah. Variasi bentuk lahan, elevasi, dan kemiringan lereng



tidak hanya menentukan pola pemanfaatan ruang, tetapi juga memengaruhi persebaran permukiman, aksesibilitas, potensi sumber daya alam, produktivitas lahan, sistem hidrologi, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana. Oleh karena itu, informasi topografi menjadi landasan penting dalam penetapan struktur dan pola ruang, pengembangan jaringan infrastruktur, serta perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara geomorfologis, topografi menggambarkan konfigurasi permukaan bumi yang terbentuk melalui interaksi proses geologi, geomorfologi, hidrologi, dan iklim dalam jangka panjang. Perbedaan ketinggian dan kemiringan lereng akan menghasilkan karakteristik wilayah yang beragam, termasuk variasi curah hujan lokal, arah dan kecepatan aliran permukaan, pola drainase, tingkat infiltrasi, ketebalan tanah, serta potensi erosi dan gerakan tanah. Kondisi tersebut selanjutnya memengaruhi kesesuaian lahan untuk berbagai fungsi, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, industri, jaringan transportasi, pariwisata, dan kawasan lindung.

Dalam perspektif penataan ruang, wilayah dengan topografi datar hingga landai umumnya memiliki tingkat kemudahan pembangunan yang relatif lebih tinggi. Wilayah tersebut cenderung sesuai untuk pengembangan permukiman, fasilitas pelayanan umum, jaringan transportasi, dan kegiatan budidaya, dengan tetap mempertimbangkan risiko banjir, genangan, serta daya dukung tanah. Sebaliknya, wilayah dengan lereng curam sampai sangat curam memiliki keterbatasan fisik yang lebih besar karena rentan terhadap erosi, longsor, dan degradasi lahan. Pemanfaatannya memerlukan pengendalian yang ketat, penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan yang memiliki fungsi perlindungan ekologis.

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 45 pulau dengan karakter bentang alam yang kompleks. Morfologi wilayahnya didominasi oleh kelas kemiringan lereng 8–15 persen, 15–25 persen, 25–40 persen, hingga lebih dari 40 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki topografi bergelombang, berbukit, curam, sampai sangat curam. Sementara itu, lahan dengan kemiringan 0–8 persen memiliki sebaran yang lebih terbatas dan tersusun atas kombinasi bentang alam datar, perbukitan berelief halus hingga kasar, serta bentang alam karst.

Wilayah dengan kemiringan 0–8 persen relatif potensial untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan, kegiatan pertanian tertentu, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kesesuaiannya tetap harus ditentukan melalui kajian yang mempertimbangkan kondisi geologi, jenis dan stabilitas tanah, sistem drainase, potensi genangan, serta kedekatannya dengan sempadan pantai dan sungai. Pada bentang alam karst, pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara lebih hati-hati karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai daerah imbuhan air tanah dan habitat ekosistem yang khas, sekaligus rentan terhadap kerusakan akibat perubahan tutupan lahan.

Pada wilayah dengan kemiringan lebih dari 15 persen, batuan dasar umumnya hanya ditutupi oleh lapisan tanah yang relatif tipis. Karakteristik tersebut menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air menjadi terbatas, terutama ketika tutupan vegetasi mengalami kerusakan. Pembukaan lahan yang tidak disertai penerapan teknik konservasi dapat meningkatkan koefisien aliran permukaan, mempercepat proses erosi, dan mengangkut material tanah menuju bagian wilayah yang lebih rendah. Dampak lanjutannya dapat berupa peningkatan potensi banjir di wilayah hilir, pendangkalan saluran drainase dan badan sungai, sedimentasi perairan pesisir, serta penurunan kualitas ekosistem laut.

Bagian tengah Pulau Taliabu secara umum didominasi oleh sistem perbukitan dan pegunungan yang memanjang dari arah barat ke timur. Bentang alam ini membentuk semacam punggung utama pulau dengan elevasi yang bervariasi, mulai sekitar 250 meter hingga lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi wilayah berada di Gunung Lida Godo dengan ketinggian sekitar 1.415 meter di atas permukaan laut. Keberadaan jajaran perbukitan dan pegunungan tersebut berperan



sebagai daerah tangkapan air, pembentuk sistem aliran sungai, serta kawasan penting bagi perlindungan keanekaragaman hayati dan kestabilan ekologis Pulau Taliabu.

Konfigurasi pegunungan di bagian tengah juga memengaruhi hubungan antara wilayah hulu dan hilir. Perubahan tutupan lahan pada kawasan hulu berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi di pesisir. Kerusakan vegetasi pada lereng dapat meningkatkan debit puncak aliran, memperbesar angkutan sedimen, dan menurunkan kontinuitas ketersediaan air pada musim kemarau. Dengan demikian, perlindungan kawasan berhutan, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah.

Berbeda dengan bagian tengah pulau, kawasan pesisir Kabupaten Pulau Taliabu memiliki topografi yang relatif rendah dan lebih landai, dengan ketinggian sekitar 4–20 meter di atas permukaan laut. Bentang lahan pesisir dicirikan oleh keberadaan satuan mikrorelief, dataran pantai, dan lembah-lembah yang saling berkesinambungan tanpa perubahan kemiringan yang terlalu tajam. Kondisi tersebut mendukung berkembangnya permukiman, fasilitas pelayanan, jaringan jalan, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang umumnya terkonsentrasi di sepanjang garis pantai.

Meskipun relatif lebih mudah dikembangkan, dataran pesisir memiliki tingkat kerentanan yang perlu diperhatikan. Elevasi yang rendah meningkatkan potensi paparan terhadap banjir pesisir, abrasi, gelombang ekstrem, kenaikan muka air laut, dan intrusi air asin. Pada lembah yang bermuara ke wilayah pesisir, sedimentasi dari kawasan hulu juga dapat memperburuk kapasitas drainase dan meningkatkan risiko genangan. Oleh sebab itu, pembangunan di kawasan pesisir perlu memperhatikan sempadan pantai, jalur evakuasi, perlindungan vegetasi pantai, kapasitas drainase, serta proyeksi perubahan iklim.

Berdasarkan ketinggian pusat pemerintahan kecamatan, ibu kota Kecamatan Taliabu Utara berada pada elevasi tertinggi, yaitu sekitar 12 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, ibu kota Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Selatan berada pada elevasi terendah, yaitu sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Perbedaan tersebut memang relatif kecil, tetapi tetap relevan dalam perencanaan sistem drainase, penyediaan air bersih, pembangunan fasilitas publik, serta upaya mitigasi banjir dan bencana pesisir.

Karakter kepulauan dan dominasi medan berbukit juga menjadi tantangan dalam penyediaan konektivitas dan pelayanan dasar. Pembangunan jalan, jaringan air minum, listrik, telekomunikasi, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang lebih tinggi pada wilayah berlereng curam dan sulit dijangkau. Karena itu, pengembangan infrastruktur perlu menggunakan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi medan, mempertimbangkan stabilitas lereng, meminimalkan pemotongan bukit, serta menghindari kawasan dengan risiko longsor dan erosi tinggi.

Secara keseluruhan, karakter topografi Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan perlunya penerapan pembangunan berbasis risiko dan daya dukung lingkungan. Kawasan datar dan landai dapat diarahkan secara selektif untuk kegiatan budidaya dan pengembangan pusat pelayanan, sedangkan wilayah berlereng curam perlu diprioritaskan sebagai kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan kawasan konservasi. Integrasi data topografi dengan informasi geologi, tanah, tutupan lahan, hidrologi, kebencanaan, dan kependudukan diperlukan untuk menghasilkan arahan pemanfaatan ruang yang lebih akurat.

Gambar berikut menyajikan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pulau Taliabu yang memperlihatkan distribusi spasial kelas-kelas kemiringan lereng di seluruh wilayah. Peta tersebut menjadi salah satu instrumen analisis dalam mengidentifikasi kesesuaian lahan, menentukan arah pengembangan kawasan, merencanakan jaringan infrastruktur, menetapkan kawasan lindung, serta menyusun langkah mitigasi terhadap erosi, banjir, longsor, dan sedimentasi. Dengan pemanfaatan informasi topografi secara tepat, kebijakan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat berlangsung secara aman, efisien, adaptif, dan berkelanjutan.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi merupakan salah satu komponen fundamental dalam karakterisasi lingkungan fisik wilayah yang memiliki peranan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Aspek geologi tidak hanya menggambarkan komposisi dan struktur batuan penyusun wilayah, tetapi juga merekam proses evolusi geologi yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga membentuk karakteristik bentang alam yang ada saat ini. Variasi litologi, struktur geologi, serta sejarah tektonik suatu wilayah berpengaruh langsung terhadap sifat fisik dan kimia tanah, ketersediaan sumber daya mineral dan energi, potensi air tanah, tingkat kesuburan lahan, hingga tingkat kerentanan terhadap berbagai bencana geologi, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah. Oleh karena itu, informasi geologi menjadi salah satu landasan ilmiah yang sangat penting dalam mendukung perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mitigasi bencana, serta penentuan arah pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Secara regional, Pulau Taliabu termasuk ke dalam **Mintakat Banggai–Sula**, yaitu salah satu satuan geologi kompleks di kawasan timur Indonesia yang terbentuk sebagai akibat interaksi tektonik antara Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dinamika tektonik tersebut menghasilkan sejarah geologi yang panjang dan kompleks, yang ditandai oleh proses pengangkatan, sedimentasi, deformasi, metamorfisme, serta aktivitas magmatisme yang berlangsung sejak Mesozoikum hingga Kenozoikum. Kompleksitas evolusi geologi tersebut menjadikan Pulau Taliabu memiliki keragaman formasi batuan dengan karakteristik litologi yang berbeda-beda, sehingga membentuk kondisi geomorfologi dan sumber daya geologi yang beragam.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Banggai–Sula dan kajian stratigrafi Pulau Taliabu, wilayah ini tersusun oleh beberapa satuan batuan utama yang meliputi **Formasi Aluvium, Formasi Peleng, Formasi Salodik, Formasi Tanamu, Formasi Buya, Formasi Bobong, Batuan Gunungapi Mangole, Granit Banggai, serta Kompleks Batuan Malihan Menanga**. Di antara seluruh satuan batuan tersebut, batuan malihan yang dikenal sebagai **Kompleks Menanga** merupakan batuan tertua yang tersingkap di Pulau Taliabu dan menjadi dasar geologi (basement rock) pembentukan wilayah.



Keberadaan batuan dasar tersebut menunjukkan bahwa Pulau Taliabu memiliki sejarah geologi yang panjang dengan tahapan pembentukan yang dipengaruhi oleh proses metamorfisme dan tektonik intensif.

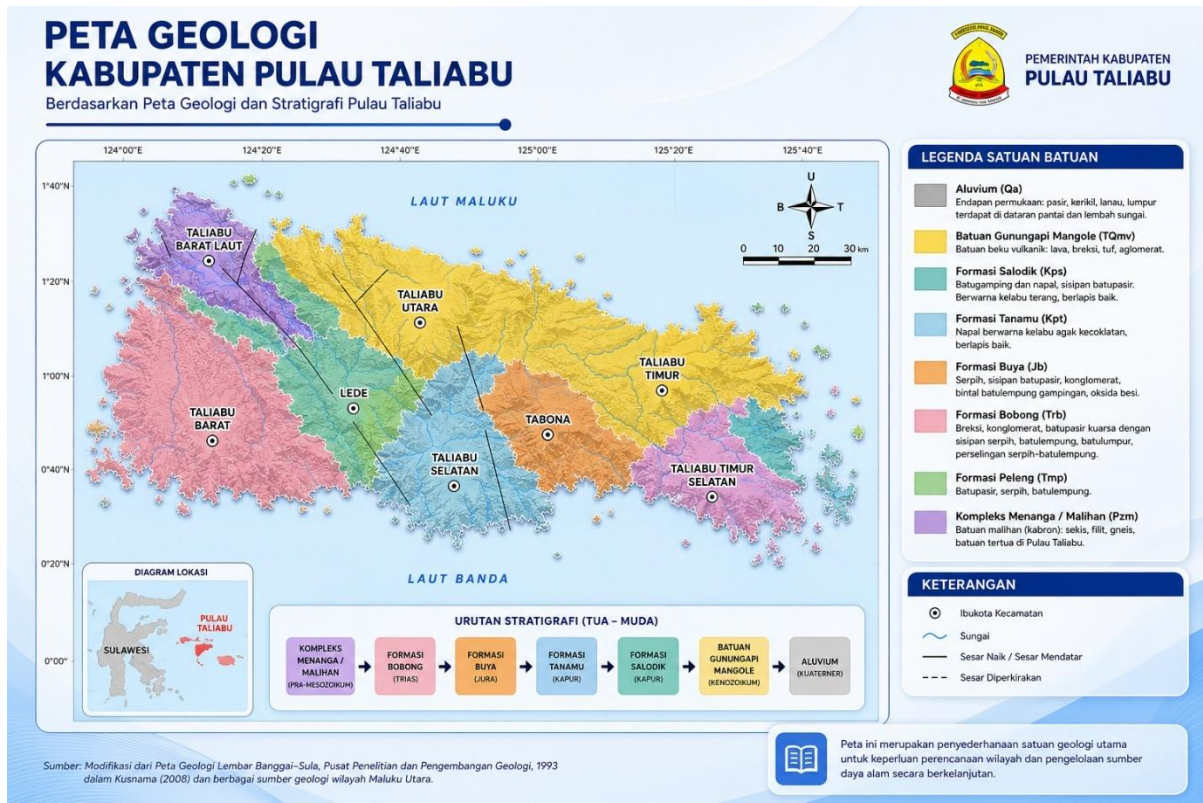
Satuan batuan yang memiliki persebaran paling luas di Pulau Taliabu adalah **Formasi Bobong**, yang menempati sebagian besar wilayah bagian barat, utara, hingga timur pulau. Formasi ini memiliki ketebalan sekitar **2.000 meter** dengan kemiringan lapisan batuan berkisar antara **20°–30°**, yang menunjukkan adanya deformasi tektonik berupa pelipatan sebagai akibat aktivitas tektonik regional (Supandjono & Haryono, 1993 dalam Kusnama, 2008). Secara stratigrafi, Formasi Bobong berkembang dari endapan hasil rombakan batuan tua akibat proses erosi yang dipicu oleh pengangkatan kerak bumi pada kala Trias. Material rombakan tersebut kemudian mengalami proses transportasi dan sedimentasi sehingga membentuk urutan batuan sedimen klastika kasar yang secara bertahap berubah menjadi sedimen klastika halus seiring perubahan lingkungan pengendapan menuju lingkungan laut yang lebih dalam.

Secara litologi, Formasi Bobong tersusun atas tiga kelompok batuan utama, yaitu **breksi dan konglomerat** sebagai penyusun bagian bawah yang mencerminkan lingkungan pengendapan berenergi tinggi; **batupasir kuarsa dengan sisipan serpih, batulempung, dan batulumpur** pada bagian tengah; serta **perselingan serpih dengan batulempung dan batulumpur** pada bagian atas yang menunjukkan transisi menuju lingkungan pengendapan laut yang relatif tenang. Karakteristik litologi tersebut memberikan indikasi bahwa Formasi Bobong memiliki variasi sifat fisik batuan yang cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap kondisi geoteknik, stabilitas lereng, dan potensi akuifer di berbagai wilayah Pulau Taliabu.

Di atas Formasi Bobong secara selaras berkembang **Formasi Buya**, yang tersusun oleh serpih dengan sisipan batupasir, konglomerat, bintal batulempung gampingan, serta oksida besi. Formasi ini menunjukkan adanya perubahan lingkungan sedimentasi yang dipengaruhi oleh fluktuasi muka laut serta dinamika pengendapan sedimen laut dangkal. Selanjutnya, Formasi Buya secara berangsur ditutupi oleh **Formasi Tanamu**, yang didominasi oleh batuan napal berwarna kelabu hingga kecokelatan dengan struktur perlapisan yang berkembang baik dan terutama tersebar di wilayah timur serta utara Pulau Taliabu. Litologi napal tersebut mengindikasikan proses sedimentasi pada lingkungan laut yang relatif tenang dengan suplai material karbonat yang cukup tinggi.

Pada bagian pantai utara sebelah timur hingga wilayah selatan Pulau Taliabu berkembang **Formasi Salodik**, yang tersusun oleh batu gamping dan napal. Batu gamping pada formasi ini umumnya berwarna kelabu terang dengan struktur perlapisan yang baik, sedangkan sisipan batupasir dan napal berwarna cokelat, bersifat kompak hingga agak keras, dengan ketebalan lapisan berkisar antara **1–10 cm**. Keberadaan Formasi Salodik menunjukkan dominasi proses sedimentasi karbonat yang berasosiasi dengan lingkungan laut dangkal, yang sekaligus memberikan indikasi adanya potensi sumber daya batu gamping sebagai bahan baku industri serta berperan penting dalam pembentukan sistem akuifer karbonat di beberapa wilayah Pulau Taliabu.

Secara keseluruhan, kondisi geologi Pulau Taliabu menunjukkan keragaman litologi dan sejarah tektonik yang kompleks sehingga menghasilkan karakteristik bentang alam yang unik serta potensi sumber daya alam yang cukup besar. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pembangunan wilayah, terutama berkaitan dengan kerentanan terhadap longsor, stabilitas lereng, serta pengelolaan kawasan berbukit dan pesisir. Oleh karena itu, integrasi informasi geologi dalam penyusunan rencana tata ruang, pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi bencana menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang berkelanjutan, tangguh terhadap bencana, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lingkungan fisik yang berperan dalam menentukan karakteristik sumber daya air, pola pemanfaatan ruang, produktivitas lahan, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi. Secara ilmiah, karakteristik hidrologi suatu wilayah dipengaruhi oleh interaksi antara kondisi geologi, topografi, iklim, tutupan lahan, dan jaringan drainase alami yang berkembang selama proses geomorfologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem hidrologi menjadi dasar yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya air, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi bencana banjir dan kekeringan.

Sistem hidrologi Pulau Taliabu menunjukkan karakteristik yang khas sebagai wilayah kepulauan dengan morfologi pegunungan dan perbukitan yang memanjang dari arah timur ke barat. Pola aliran sungai di wilayah ini berkembang sebagai respon terhadap kondisi geologi yang kompleks, terutama dipengaruhi oleh jenis batuan penyusun, struktur geologi, dan bentuk bentang alam. Secara geomorfologi, sungai-sungai cenderung berkembang mengikuti zona-zona lemah batuan berupa rekahan (joint), patahan (fault), serta lipatan (fold), sehingga arah aliran sungai tidak hanya dipengaruhi oleh kemiringan lereng tetapi juga oleh struktur geologi yang berkembang di bawah permukaan.

Secara umum, sebagian besar sungai di Pulau Taliabu mengalir ke arah **utara** dan bermuara di **Laut Maluku**, sedangkan sebagian lainnya mengalir ke arah **selatan** menuju **Laut Seram** dan **Laut Banda**. Keberadaan rangkaian pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Taliabu berfungsi sebagai **punggung pembagi air (watershed divide)** yang memisahkan sistem aliran permukaan menjadi tiga daerah tangkapan hujan utama, yaitu daerah tangkapan yang mengalir ke arah utara, selatan, dan barat. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi sumber daya air permukaan relatif berbeda



pada masing-masing wilayah, baik dari aspek panjang sungai, debit aliran, maupun luas daerah tangkapan air.

Di wilayah bagian barat Pulau Taliabu, kepadatan jaringan sungai relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jarak antara daerah hulu dengan garis pantai yang relatif pendek sehingga perkembangan sistem sungai menjadi terbatas. Sebaliknya, pada wilayah tengah hingga timur pulau berkembang jaringan sungai yang lebih kompleks sebagai akibat kombinasi antara topografi pegunungan, curah hujan, serta struktur geologi yang lebih intensif.

Berdasarkan karakteristik geomorfologinya, pola aliran sungai utama di Pulau Taliabu umumnya membentuk **pola dendritik**, yaitu pola percabangan menyerupai ranting pohon yang berkembang pada batuan dengan tingkat resistensi relatif homogen. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Taliabu tersusun oleh batuan sedimen dan batuan beku yang relatif seragam dalam mengontrol arah perkembangan sungai. Sementara itu, pada sungai-sungai berukuran lebih kecil berkembang **pola aliran sejajar (parallel drainage pattern)** yang umumnya dijumpai pada lereng-lereng terjal dengan kemiringan yang relatif seragam. Di beberapa lokasi, khususnya di sekitar **Kampung Loseng, Kecamatan Taliabu Timur**, perkembangan morfologi sungai menunjukkan pengaruh struktur geologi berupa rekahan, sesar, dan lipatan yang menyebabkan perubahan arah aliran sungai secara lokal.

Ditinjau dari karakteristik hidrogeologinya, kondisi akuifer di Pulau Taliabu dapat dibedakan menjadi dua zona utama. Zona pertama merupakan **wilayah dengan tingkat kelulusan air (permeabilitas) sangat rendah**, yang berkembang pada akuifer yang tersusun oleh batuan beku dan batuan metamorf, terutama granit, granodiorit, diabas, sekis, gneiss, batu sabak, dan kuarsit. Akuifer jenis ini memiliki kemampuan menyimpan dan mengalirkan air tanah yang relatif terbatas karena porositas primer batuanya sangat rendah. Wilayah hidrogeologi ini terutama berkembang di bagian tengah hingga barat Pulau Taliabu.

Zona kedua merupakan **wilayah dengan tingkat kelulusan rendah hingga sedang**, yang berkembang pada akuifer yang tersusun oleh batuan sedimen dan endapan Gunung Api Tua Mangole berupa breksi, konglomerat, aglomerat, dan lava yang telah mengalami proses pelipatan maupun pensesaran. Struktur geologi tersebut menyebabkan terbentuknya porositas sekunder berupa rekahan dan bidang sesar sehingga kemampuan batuan dalam menyimpan dan mengalirkan air tanah menjadi lebih baik dibandingkan batuan beku dan metamorf. Zona hidrogeologi ini terutama berkembang pada wilayah timur Pulau Taliabu.

Dalam sistem pengelolaan sumber daya air nasional, Kabupaten Pulau Taliabu termasuk ke dalam **Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Sula–Obi**, yang terdiri atas **67 Daerah Aliran Sungai (DAS)**. Keberadaan DAS tersebut memiliki fungsi strategis sebagai pengatur tata air, penyedia sumber air baku, penyangga ekosistem, serta pengendali banjir dan sedimentasi. Oleh karena itu, pengelolaan DAS secara terpadu menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.

 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN SULA – OBI  PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU					
No	Nama DAS	No	Nama DAS	No	Nama DAS
001	DAS Balohal	023	DAS Made	045	DAS Kawadang
002	DAS Todeli	024	DAS Dratu	046	DAS Sota
003	DAS Pango	025	DAS Hene	047	DAS Niyu
004	DAS Samada Kecil	026	DAS Kaway	048	DAS Nayo
005	DAS Samada Besar	027	DAS Tenamu	049	DAS Tabona
006	DAS Sambada	028	DAS Parigi	050	DAS Kampung Baru
007	DAS Fakayu	029	DAS Wasa	051	DAS Mina
008	DAS Sahu	030	DAS Fota	052	DAS Kilo
009	DAS Sanabong	031	DAS Nata	053	DAS Miha
010	DAS Way Nudu	032	DAS Ncapa	054	DAS Wendi
011	DAS Way Buya	033	DAS Gandolo	055	DAS Dionidi
012	DAS Nabi	034	DAS Lagoi	056	DAS Langsa
013	DAS Dege	035	DAS Koka	057	DAS Lipomo
014	DAS Way Hai	036	DAS Faku	058	DAS Gegasi
015	DAS Tuma	037	DAS Mono	059	DAS Lalo
016	DAS Kobu	038	DAS Sarisi	060	DAS Kano
017	DAS Way Palata	039	DAS Palaso	061	DAS Tamundu
018	DAS Mananga	040	DAS Way Kada	062	DAS Sehu
019	DAS Way Teniti	041	DAS Husu	063	DAS Kilong
020	DAS Bua	042	DAS Kiha	064	DAS Deluma
021	DAS Mbono	043	DAS Kuyu	065	DAS bringin Jaya
022	DAS Kabuha	044	DAS Sangbo	066	DAS Lisa
				067	DAS Limbo

Sumber: Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, 2024

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Selain sistem sungai, hidrologi permukaan Pulau Taliabu juga dicirikan oleh keberadaan kawasan rawa, terutama **rawa hutan bakau (mangrove)** yang berkembang pada wilayah pesisir dengan energi gelombang relatif rendah. Berdasarkan **Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Taliabu Tahun 2013–2022**, ekosistem rawa bakau tersebar terutama di sepanjang pesisir bagian barat dan utara Pulau Taliabu. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, habitat berbagai jenis biota pesisir, penyerap karbon, serta daerah penyangga terhadap intrusi air laut. Namun demikian, dataran pantai yang memiliki kerapatan muara sungai tinggi juga mempunyai tingkat kerentanan banjir yang cukup besar, khususnya pada saat terjadi kombinasi antara curah hujan tinggi dan pasang air laut.

Secara keseluruhan, kondisi hidrologi Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan keterkaitan yang erat antara geologi, topografi, dan sistem daerah aliran sungai dalam membentuk dinamika sumber daya air wilayah. Kondisi tersebut memberikan potensi yang besar bagi pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan penyediaan air bersih, namun sekaligus memerlukan pengelolaan yang terpadu untuk mengurangi risiko banjir, sedimentasi, degradasi daerah tangkapan air, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan hidrologi berbasis konservasi DAS dan perlindungan kawasan resapan air perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh terhadap bencana, dan berwawasan lingkungan.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Berdasarkan karakteristik hidrologi dan kondisi fisiografi wilayah, beberapa kawasan di Wilayah Sungai Kepulauan Sula–Obi memiliki potensi banjir yang relatif tinggi. Kawasan tersebut meliputi **Kota Sanana**, **Sub DAS Wayipa–Anponhia**, kawasan **Tanjung Babo–Teluk Barakasi–Falabisahaya**, **Teluk Hulangse**, **Teluk Unatu–Teluk Hini**, **Sub DAS Way Hu–Way Hoyu**, kawasan **Menanga–Way Dege**, **Bobong dan sekitarnya**, serta **Sub DAS Way Kilo–Pancado**. Pada wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, kawasan **Bobong** beserta dataran sekitarnya merupakan salah satu lokasi yang memiliki tingkat kerentanan banjir relatif tinggi karena berada pada dataran rendah pesisir dengan sistem drainase yang dipengaruhi oleh pasang surut laut serta akumulasi limpasan dari daerah hulu.

WILAYAH DENGAN POTENSI BANJIR

Di Wilayah Sungai Kepulauan Sula – Obi

Berdasarkan kondisi hidrologi dan faktor-faktor fisik wilayah, berikut merupakan area yang memiliki potensi banjir:



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

2.1.1.5 Kondisi Geomorfologi

Geomorfologi merupakan salah satu komponen utama dalam karakterisasi kondisi fisik wilayah yang menggambarkan bentuk permukaan bumi sebagai hasil interaksi berbagai proses geologi, geomorfik, hidrologi, dan oseanografi yang berlangsung dalam rentang waktu geologi yang panjang. Karakteristik geomorfologi suatu wilayah memberikan informasi penting mengenai evolusi bentang alam, dinamika proses eksogen dan endogen, serta potensi maupun keterbatasan wilayah untuk berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, analisis geomorfologi menjadi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana tata ruang, pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, konservasi lingkungan, serta mitigasi risiko bencana.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakter geomorfologi yang kompleks sebagai konsekuensi dari interaksi antara proses tektonik regional, aktivitas geologi, kondisi iklim tropis basah, serta dinamika oseanografi yang berkembang di kawasan timur Indonesia. Evolusi bentang alam Pulau Taliabu dipengaruhi oleh proses pengangkatan tektonik, pelapukan batuan, erosi, sedimentasi, dan aktivitas pesisir yang berlangsung secara simultan sehingga membentuk variasi morfologi yang cukup beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan struktural, dataran aluvial, hingga kawasan pesisir dan rawa mangrove.

Secara morfologi, bagian tengah Pulau Taliabu didominasi oleh rangkaian **perbukitan dan pegunungan struktural** yang memanjang dari arah barat ke timur dengan kemiringan lereng umumnya tergolong sedang hingga curam. Rangkaian pegunungan tersebut berfungsi sebagai **punggung pembagi air (watershed divide)** yang membentuk tiga sistem daerah tangkapan air utama, yaitu aliran yang mengarah ke **Laut Maluku** di bagian utara, **Laut Banda dan Laut Seram** di bagian selatan, serta sebagian wilayah yang mengalir ke arah barat. Kondisi geomorfologi tersebut menyebabkan perkembangan jaringan sungai yang relatif rapat pada wilayah pegunungan dengan lembah-lembah sempit dan lereng yang memiliki tingkat energi erosi cukup tinggi.



Pada bagian pesisir berkembang **dataran aluvial** dengan elevasi rendah yang terbentuk sebagai hasil proses sedimentasi material yang diangkut oleh sungai menuju muara. Dataran ini umumnya memiliki topografi relatif datar hingga landai, tersusun oleh endapan aluvium muda, dan berkembang terutama di sekitar kawasan muara sungai serta teluk-teluk yang terlindung. Selain dataran aluvial, di beberapa lokasi juga berkembang **lembah-lembah mikro**, dataran pantai sempit, serta punggung-punggungan kecil yang terbentuk akibat kombinasi proses sedimentasi fluvial, sedimentasi marin, dan pengangkatan tektonik. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir menjadi kawasan yang relatif sesuai untuk pengembangan permukiman, aktivitas perikanan, serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, meskipun memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap banjir rob, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut.

Karakteristik geomorfologi Pulau Taliabu juga tercermin dari pola perkembangan jaringan sungainya. Sungai-sungai utama umumnya membentuk **pola aliran dendritik**, yang berkembang pada satuan batuan dengan tingkat resistensi relatif homogen. Sebaliknya, pada wilayah dengan kemiringan lereng yang lebih besar dan dipengaruhi oleh struktur geologi berupa rekahan, patahan, dan lipatan, berkembang **pola aliran sejajar (parallel drainage pattern)** yang mengikuti arah struktur batuan. Hubungan yang erat antara morfologi sungai dan struktur geologi menunjukkan bahwa perkembangan bentang alam Pulau Taliabu tidak hanya dikendalikan oleh proses erosi permukaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh evolusi tektonik regional.

Di kawasan pesisir, proses geomorfik modern masih berlangsung secara aktif melalui mekanisme **sedimentasi, abrasi pantai, pembentukan gosong pasir, serta perkembangan ekosistem rawa mangrove**. Interaksi antara proses fluvial dan marin menghasilkan bentang alam pesisir yang dinamis dengan karakteristik estuari, dataran lumpur pasang surut, dan kawasan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap abrasi dan gelombang laut. Keberadaan ekosistem mangrove juga berperan penting dalam menjaga stabilitas garis pantai, meningkatkan produktivitas perairan pesisir, serta mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati kawasan pesisir Pulau Taliabu.

Dari perspektif pembangunan wilayah, kondisi geomorfologi Kabupaten Pulau Taliabu memberikan peluang sekaligus tantangan. Wilayah pegunungan memiliki fungsi strategis sebagai kawasan lindung, daerah imbuhan air tanah, dan kawasan konservasi, namun memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur karena memiliki tingkat kerentanan terhadap longsor dan erosi. Sebaliknya, kawasan dataran aluvial dan pesisir memiliki potensi yang besar untuk pengembangan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, dan kegiatan budidaya, namun memerlukan pengelolaan yang adaptif terhadap ancaman banjir, abrasi, serta perubahan iklim.

Dengan demikian, karakter geomorfologi Kabupaten Pulau Taliabu merupakan hasil integrasi berbagai proses geologi, hidrologi, dan oseanografi yang membentuk bentang alam kepulauan tropis yang khas. Pemahaman terhadap karakteristik geomorfologi tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis daya dukung lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengurangan risiko bencana, sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi merupakan salah satu faktor fisik lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pembangunan wilayah, karena menentukan karakteristik hidrologi, produktivitas sektor pertanian, perikanan, kehutanan, ketersediaan sumber daya air, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Variabilitas unsur-unsur iklim, seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, intensitas penyinaran matahari, dan pola sirkulasi angin, berperan penting dalam membentuk karakteristik ekosistem serta memengaruhi pola aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, informasi klimatologi menjadi salah satu dasar ilmiah dalam



penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Secara geografis, Kabupaten Pulau Taliabu berada di kawasan kepulauan tropis Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem **iklim monsun (monsunal tropical climate)**. Karakteristik iklim wilayah ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan massa udara regional, dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia, serta kondisi oseanografi Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Seram. Interaksi antara sistem monsun Asia–Australia, sirkulasi angin regional, serta fenomena oseanografi menyebabkan Kabupaten Pulau Taliabu mengalami dua musim utama yang berlangsung secara bergantian sepanjang tahun, yaitu **musim barat** dan **musim timur**, yang dipisahkan oleh periode pancaroba.

Musim barat umumnya berlangsung pada **Oktober hingga Maret**, dengan intensitas tertinggi terjadi pada **Desember hingga Januari**. Pada periode ini, angin dominan bertiup dari arah utara hingga barat laut dan membawa massa udara lembap yang menyebabkan peningkatan curah hujan serta tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Pulau Taliabu, Pulau Mangole, dan Pulau Lifumatola. Kondisi oseanografi tersebut sering mengakibatkan terganggunya aktivitas pelayaran dan transportasi laut, bahkan pada kondisi cuaca ekstrem dapat menyebabkan penghentian sementara layanan transportasi antarpulau. Mengingat karakter Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada konektivitas laut, dinamika musim barat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas perekonomian daerah.

Sebaliknya, **musim timur** berlangsung pada **April hingga September**, dengan puncak musim umumnya terjadi pada **Agustus**. Pada periode ini, arah angin dominan berubah menjadi berasal dari selatan hingga tenggara sebagai bagian dari pengaruh Monsun Australia yang relatif lebih kering. Meskipun intensitas hujan cenderung menurun dibandingkan musim barat, kondisi cuaca pada musim timur tetap dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional sehingga distribusi curah hujan di Pulau Taliabu tidak selalu menunjukkan pola yang seragam. Peralihan antara kedua musim tersebut ditandai oleh periode **pancaroba**, yaitu sekitar bulan **April** sebagai transisi dari musim barat menuju musim timur, serta **September** sebagai transisi dari musim timur menuju musim barat. Pada masa pancaroba, kondisi cuaca cenderung lebih dinamis dengan perubahan arah angin, intensitas hujan, serta potensi kejadian cuaca ekstrem yang relatif lebih tinggi.

Secara klimatologis, karakter iklim Kabupaten Pulau Taliabu juga dipengaruhi oleh faktor topografi wilayah yang didominasi pegunungan dan perbukitan di bagian tengah pulau. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya variasi spasial curah hujan melalui mekanisme **hujan orografis**, di mana massa udara lembap yang bergerak menuju pegunungan mengalami pengangkatan sehingga membentuk awan dan meningkatkan intensitas hujan pada lereng-lereng tertentu. Fenomena ini berkontribusi terhadap perbedaan karakteristik hidrologi antarwilayah serta memengaruhi distribusi sumber daya air permukaan maupun air tanah di Pulau Taliabu.

Berdasarkan data pengamatan **Stasiun Meteorologi Kepulauan Sula** yang dikelola oleh **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)**, kondisi klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu dapat digambarkan melalui beberapa parameter utama, yaitu **suhu udara, kelembapan udara relatif, curah hujan, jumlah hari hujan, intensitas penyinaran matahari, serta unsur-unsur meteorologi lainnya**. Parameter-parameter tersebut memberikan gambaran mengenai dinamika iklim lokal yang menjadi dasar dalam analisis kondisi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan sektor pertanian, penyediaan air bersih, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

Secara keseluruhan, karakteristik iklim tropis monsun yang dimiliki Kabupaten Pulau Taliabu memberikan potensi yang besar bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun demikian, dinamika musim, variabilitas curah hujan, serta perubahan pola angin juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terhadap keberlanjutan sistem transportasi laut, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, integrasi informasi

klimatologi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang adaptif terhadap perubahan iklim, berketahanan terhadap bencana, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2020 dari Stasiun Meteorologi Kepulauan Sula yang dikelola oleh BMKG, kondisi klimatologi Pulau Taliabu mencakup parameter suhu udara, kelembapan, presipitasi, penyinaran matahari, serta curah hujan harian, yang disajikan sebagai berikut :



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

JUMLAH KECEPATAN ANGIN DAN TEKINAN UDARA

KABUPATEN PULAU TALIBU

No	Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan Udara		
		Min (m/dt)	Rata-rata (m/dt)	Max (m/dt)	Min (mbar)	Rata-rata (mbar)	Max (mbar)
1	Januari	0	1	8	1004.6	1009.3	1014.4
2	Februari	0	2	5	1005.7	1010.2	1013.7
3	Maret	0	1	4	1006.1	1009.8	1013.7
4	April	0	1	4	1006.7	1010.0	1013.0
5	Mei	0	1	4	1004.4	1009.7	1014.5
6	Juni	0	2	8	1006.7	1009.9	1013.5
7	Juli	0	2	6	1006.4	1009.3	1012.4
8	Agustus	0	1	7	1006.5	1010.2	1014.8
9	September	0	1	5	1005.8	1009.7	1013.3
10	Oktober	0	1	4	1004.9	1008.8	1013.6
11	November	0	1	5	1005.0	1008.8	1013.7
12	Desember	0	1	5	1003.9	1007.7	1011.3
RATA-RATA		0	1	5	1005.3	1009.4	1013.8



Sumber:
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika,
Stasiun Meteorologi Emalamo Kepulauan Sula Tahun 2020

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



JUMLAH SUHU DAN KELEMBABAN

KABUPATEN PULAU TALIBU

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Min (°C)	Rata-rata (°C)	Max (°C)	Min (%)	Rata-rata (%)	Max (%)
1	Januari	24.1	28.3	34.6	47	79	97
2	Februari	23.4	28.5	34.2	48	77	97
3	Maret	24	28	34	54	83	97
4	April	24.2	28.1	33.4	56	82	97
5	Mei	24.6	28.4	33.2	59	84	97
6	Juni	23.6	28.1	32.4	62	82	98
7	Juli	23.6	28.2	32	27	79	98
8	Agustus	23.2	27.5	31.8	54	81	98
9	September	24	27.6	32	61	83	98
10	Oktober	23.6	27.8	33	60	84	98
11	November	24	28	33.2	58	84	98
12	Desember	24.2	27.8	33.2	57	85	97
RATA-RATA		23.8	28.0	33.0	53.1	81.5	97.4



SUHU
Rata-rata Tahunan
28.0 °C



KELEMBABAN
Rata-rata Tahunan
81.5 %



Sumber:
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika,
Stasiun Meteorologi Emalamo Kepulauan Sula Tahun 2020

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi sebagai konsekuensi dari interaksi antara faktor biofisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Perubahan penggunaan lahan tidak hanya mencerminkan perkembangan aktivitas manusia, tetapi juga menunjukkan tingkat tekanan terhadap sumber daya alam serta keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, analisis penggunaan lahan menjadi salah satu aspek strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah karena berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan, konservasi sumber daya alam, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara historis, bentang alam Pulau Taliabu pada awalnya didominasi oleh kawasan **hutan hujan tropis primer** yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi dan berfungsi sebagai penyangga utama sistem ekologis wilayah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi, serta pembukaan akses wilayah, terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, serta eksploitasi hasil hutan menyebabkan sebagian besar kawasan hutan primer mengalami transformasi menjadi **hutan sekunder**. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Saat ini, kawasan hutan primer hanya tersisa pada beberapa lokasi yang relatif sulit dijangkau dan masih memiliki tingkat gangguan antropogenik yang rendah, yaitu di bagian selatan **Kecamatan Taliabu Utara**, bagian utara **Kecamatan Taliabu Selatan**, serta wilayah barat **Kecamatan Tabona**. Keberadaan kawasan hutan primer tersebut memiliki nilai ekologis yang sangat penting karena berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna endemik, kawasan resapan air, pengatur iklim mikro, serta penyimpan cadangan karbon. Oleh karena itu, kawasan tersebut memerlukan perlindungan yang lebih intensif melalui penguatan fungsi kawasan lindung, pengendalian alih fungsi lahan, serta penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari guna menjaga keberlanjutan ekosistem Pulau Taliabu.

Dalam perspektif perencanaan ruang, pemanfaatan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu mengacu pada **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** yang membagi wilayah ke dalam dua fungsi utama, yaitu **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**. Kawasan lindung diarahkan untuk mempertahankan fungsi ekologis wilayah sehingga pemanfaatannya dibatasi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Kawasan ini meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan konservasi, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, serta berbagai kawasan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Sebaliknya, kawasan budidaya dialokasikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan permukiman, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai bentuk pemanfaatan lahan produktif lainnya yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan karakteristik penggunaan lahannya, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki berbagai bentuk pemanfaatan ruang yang meliputi **sawah, ladang atau huma, tegalan atau kebun, kebun campuran, kawasan permukiman, lahan terbuka, rawa, kawasan mangrove, serta kawasan hutan**. Sebaran penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis tanah, aksesibilitas, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Wilayah pesisir umumnya berkembang sebagai kawasan permukiman dan aktivitas perikanan, sedangkan wilayah dataran hingga lereng perbukitan lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering dan perkebunan rakyat.

Berdasarkan data penggunaan lahan, kawasan hutan masih merupakan penutup lahan terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu dengan luas sekitar **152.709,55 hektare**, diikuti oleh **kebun campuran seluas 131.264,68 hektare, mangrove seluas 3.804,14 hektare, rawa seluas 568,20 hektare, semak belukar seluas 692,65 hektare**, serta **permukiman seluas 494,40 hektare**. Selain itu,



Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki kawasan konservasi berupa **Cagar Alam Pulau Taliabu** dengan luas sekitar **9.743 hektare**, yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati dan habitat berbagai spesies endemik kawasan Wallacea.

Pada wilayah pesisir dan dataran rendah, penggunaan lahan didominasi oleh **pertanian lahan kering** dan **perkebunan rakyat**, sedangkan sebagian wilayah lainnya masih berupa lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal. Komoditas perkebunan yang berkembang secara dominan meliputi **cengkeh (*Syzygium aromaticum*)**, **kelapa (*Cocos nucifera*)**, dan **kakao (*Theobroma cacao*)**, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat serta memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Selain komoditas tersebut, beberapa kawasan juga dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura skala rumah tangga sesuai dengan karakteristik kondisi lahan masing-masing wilayah.

Data penutupan lahan terkini menunjukkan bahwa bentang alam Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh **Hutan Rimba** dengan luas sekitar **261.793,47 hektare** atau **87,69%** dari total luas wilayah. Penutup lahan terbesar berikutnya adalah **Semak Belukar** seluas **20.046,91 hektare** atau **6,72%**, sedangkan **Perkebunan/Kebun** mencakup sekitar **10.016,01 hektare** atau **3,36%**. Dominasi kawasan berhutan tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi ekologis Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif baik dibandingkan banyak wilayah kepulauan lainnya di Indonesia. Namun demikian, peningkatan kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi kegiatan ekonomi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Secara keseluruhan, pola penggunaan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu memperlihatkan keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya yang masih perlu dipertahankan. Keberadaan kawasan hutan yang luas menjadi modal ekologis yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengendalikan erosi, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya yang telah tersedia, penguatan perlindungan kawasan lindung, rehabilitasi lahan terdegradasi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dalam jangka panjang.

PENGUNAAN LAHAN KABUPATEN PULAU TALIABU

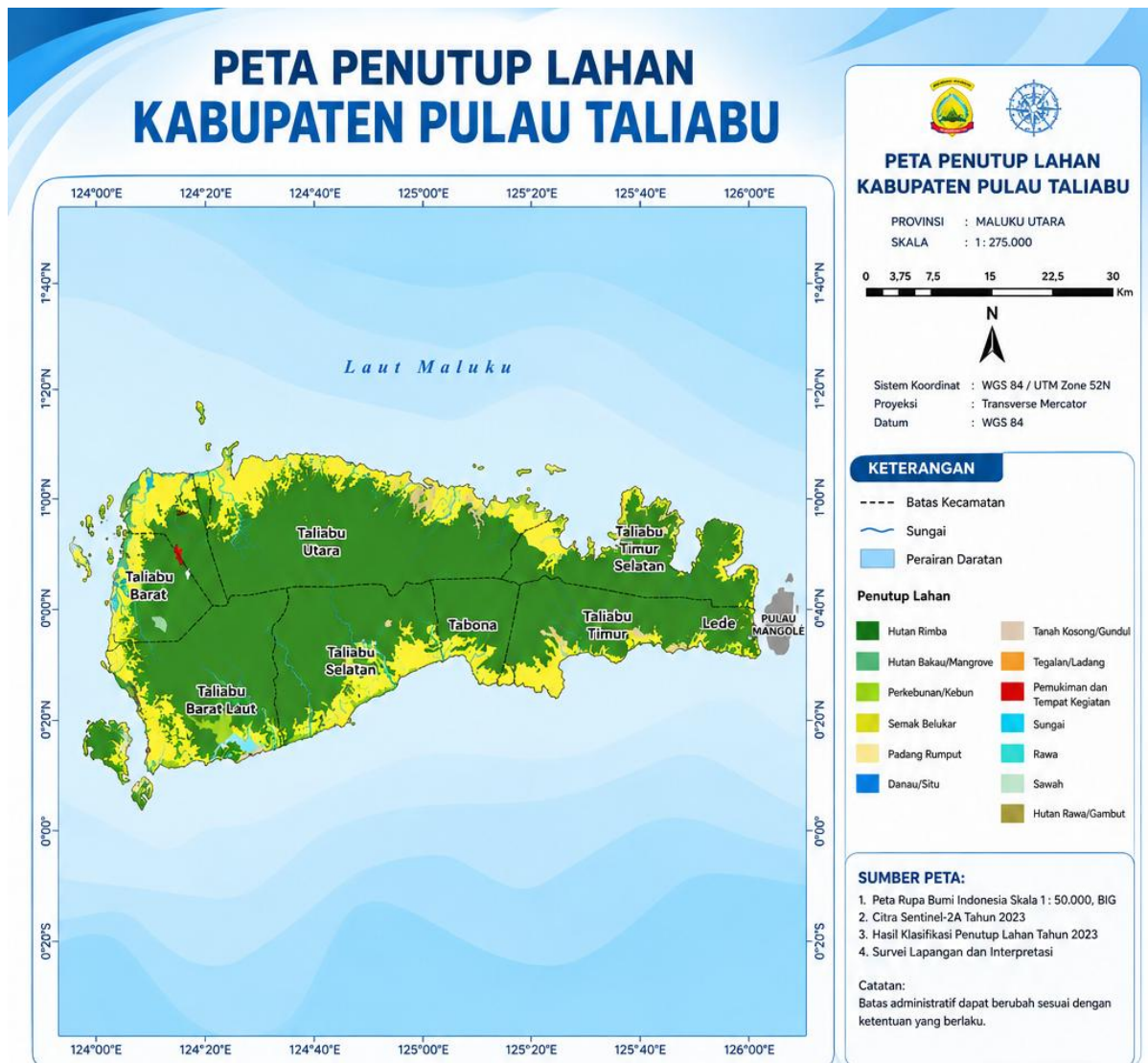
No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Rimba	261.793,47	87,69
2.	Semak Belukar	20.046,91	6,72
3.	Perkebunan/kebun	10.016,01	3,36
4.	Padang Rumput	1.860,64	0,62
5.	Danau/Situ	1.112,94	0,37
6.	Tanah kosong/Gundul	1.393,45	0,47
7.	Tegalan/Ladang	721,95	0,24
8.	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	553,38	0,19
9.	Sungai	673,31	0,23
10.	Hutan Bakau/Mangrove	283,77	0,10
11.	Rawa	54,16	0,02
12.	Sawah	13,94	0,00
13.	Hutan Rawa/Gambut	3,82	0,00

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
14.	Gedung/Bangunan	0,15	0,00
15.	Bating Karang	0,02	0,00
Jumlah		298.527,92	100,00



Sumber:
Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu, (2025)

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik fisik dan geografis yang memberikan peluang besar bagi pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya alam, baik pada kawasan daratan maupun kawasan pesisir. Keberadaan bentang alam yang didominasi oleh wilayah perbukitan, dataran pesisir, kawasan hutan tropis, serta wilayah laut yang luas membentuk keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi geomorfologi, geologi, hidrologi, dan sumber daya pesisir yang beragam menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi strategis pada sektor **perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, energi, serta pertambangan**.

Secara konseptual, pengembangan wilayah merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Adisasmita (2008) dalam Ekosafitri (2017), pengembangan wilayah merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan keterkaitannya terhadap sistem pembangunan regional maupun nasional.

Sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Seram, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi yang sangat besar pada sektor **perikanan tangkap maupun perikanan budidaya**. Luas wilayah perairan yang relatif besar serta ketersediaan sumber daya ikan pelagis maupun demersal memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi kelautan sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Namun demikian, optimalisasi sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan, fasilitas pelabuhan perikanan, rantai dingin (*cold storage*), industri pengolahan hasil perikanan, serta sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah komoditas perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih bergantung pada daerah lain sebagai pusat pengolahan.

Selain sektor kelautan, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan **pariwisata berbasis alam dan budaya**. Keindahan bentang pesisir dengan hamparan pantai berpasir putih, ekosistem terumbu karang yang masih relatif baik, kawasan hutan tropis yang alami, serta kekayaan budaya lokal merupakan modal utama bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Menurut Degasou (2024), kekayaan sumber daya wisata tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara apabila didukung oleh peningkatan aksesibilitas, infrastruktur dasar, promosi destinasi, serta pengelolaan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Dalam konteks pengembangan ekonomi regional, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kawasan **Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah)** sebagai salah satu pusat distribusi dan perdagangan regional. Hubungan ekonomi tersebut terlihat pada aktivitas perdagangan hasil kelautan, komoditas rumput laut, serta hasil pertanian dan perkebunan yang sebagian besar dipasarkan melalui wilayah Sulawesi Tengah. Keterkaitan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu merupakan bagian dari sistem ekonomi regional yang memerlukan penguatan konektivitas transportasi, logistik, dan jaringan perdagangan guna meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan arah kebijakan **RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019–2024**, Kabupaten Pulau Taliabu diarahkan sebagai salah satu kawasan pengembangan **komoditas rumput laut**, mengingat potensi sumber daya pesisir yang tersedia serta tingginya tingkat produksi yang telah berkembang pada beberapa wilayah pesisir. Selain itu, dari sisi struktur perekonomian daerah, sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan** masih menjadi sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap



pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di samping sektor primer tersebut, beberapa lapangan usaha menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, antara lain **pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran**, serta **reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor**, yang mencerminkan mulai berkembangnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama berkaitan dengan keterbatasan **infrastruktur transportasi darat dan transportasi laut**. Sebagai wilayah kepulauan, mobilitas penduduk dan distribusi barang masih sangat bergantung pada moda transportasi laut, sementara jaringan jalan antarwilayah belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik relatif tinggi, waktu distribusi menjadi lebih panjang, serta memengaruhi daya saing produk-produk unggulan daerah. Keterbatasan konektivitas juga berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, pemasaran hasil produksi, serta investasi di berbagai sektor pembangunan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu dalam **RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019–2024** diarahkan pada dua strategi utama, yaitu **penguatan sektor-sektor unggulan daerah** dan **peningkatan konektivitas transportasi regional**. Penguatan sektor unggulan dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur transportasi darat, pelabuhan, dan konektivitas antarpulau diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan keterhubungan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dalam jangka menengah, arah pengembangan wilayah Kabupaten Pulau Taliabu difokuskan pada percepatan **kemandirian ekonomi daerah**, peningkatan **daya saing wilayah**, serta pemerataan pembangunan antar kecamatan melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan. Kabupaten Pulau Taliabu juga ditetapkan sebagai salah satu **sentra pengembangan komoditas perkebunan**, khususnya **kelapa** dan **jambu mete**, yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agroindustri. Dengan dukungan kebijakan pembangunan yang terintegrasi, penguatan konektivitas wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki prospek yang besar untuk berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik geologi, geomorfologi, hidrologi, serta kondisi klimatologi Kabupaten Pulau Taliabu menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Sebagai bagian dari kawasan kepulauan di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu berada pada jalur **Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire)** dan merupakan bagian dari kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Interaksi antar lempeng tersebut membentuk sistem sesar aktif dan zona subduksi yang menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat aktivitas seismik yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Pulau Taliabu rentan terhadap **bencana geologi**, terutama **gempa bumi** dan **tsunami**, yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, serta aktivitas sosial ekonomi.

Di samping kerawanan geologi, karakteristik fisiografi Kabupaten Pulau Taliabu yang didominasi oleh kawasan perbukitan, pegunungan, dan dataran pesisir juga meningkatkan kerentanan terhadap **bencana hidrometeorologi**, terutama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun, jaringan sungai yang berhulu di kawasan pegunungan, serta keberadaan dataran rendah di sekitar muara sungai menyebabkan beberapa wilayah memiliki potensi genangan dan limpasan permukaan yang tinggi. Pada musim hujan, peningkatan debit sungai yang berlangsung



secara cepat sering memicu terjadinya banjir maupun banjir bandang, terutama pada kawasan permukiman yang berkembang di sepanjang alur sungai dan wilayah pesisir.

Kerentanan terhadap bencana tersebut semakin dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, pembukaan kawasan hutan, serta meningkatnya aktivitas pembangunan pada wilayah yang memiliki fungsi lindung. Perubahan tutupan vegetasi pada daerah tangkapan air dapat mengurangi kemampuan infiltrasi tanah sehingga meningkatkan limpasan permukaan (*surface runoff*) dan memperbesar potensi terjadinya banjir maupun erosi. Di sisi lain, pembangunan permukiman pada kawasan lereng dan dataran banjir tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan juga berpotensi meningkatkan tingkat risiko bencana bagi masyarakat.

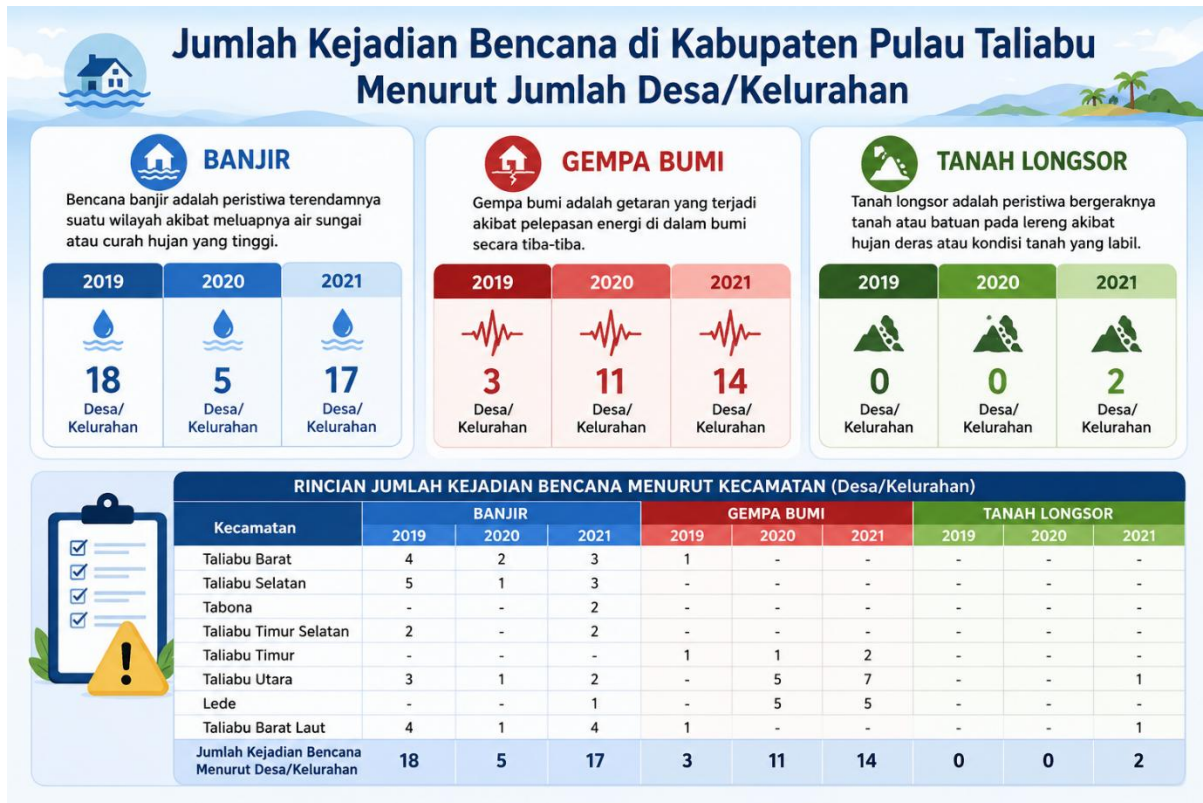
Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024**, jenis bencana yang paling sering terjadi selama periode **2019–2021** meliputi **banjir, gempa bumi, dan tanah longsor**. Dari ketiga jenis bencana tersebut, **banjir** merupakan kejadian yang paling dominan, khususnya pada tahun **2019**, ketika sebanyak **18 desa/kelurahan** terdampak banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman utama bagi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, terutama pada kawasan dataran rendah, wilayah pesisir, serta permukiman yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

Sementara itu, **gempa bumi** merupakan bencana geologi dengan frekuensi kejadian yang cukup tinggi sebagai konsekuensi dari posisi Kabupaten Pulau Taliabu yang berada pada kawasan tektonik aktif. Pada tahun **2021**, kejadian gempa bumi tercatat berdampak pada **14 desa/kelurahan**, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah wilayah terdampak gempa bumi tertinggi selama periode pengamatan. Meskipun sebagian besar kejadian gempa yang tercatat tidak selalu menimbulkan kerusakan besar, keberadaan sumber gempa aktif di sekitar wilayah Maluku Utara tetap menempatkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu kawasan yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi terhadap potensi gempa bumi dan tsunami.

Jenis bencana lainnya adalah **tanah longsor**, yang relatif lebih sedikit dibandingkan banjir dan gempa bumi. Selama periode 2019–2020 belum terdapat laporan kejadian longsor yang signifikan, namun pada tahun **2021** tercatat **dua desa/kelurahan** mengalami bencana tanah longsor. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun frekuensinya relatif rendah, potensi longsor tetap perlu diwaspadai, terutama pada kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, kondisi geologi yang kurang stabil, serta wilayah yang mengalami degradasi tutupan lahan.

Berdasarkan karakteristik ancaman tersebut, pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi antara **perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, konservasi lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana**. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi kawasan hutan, penguatan sistem drainase, serta pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*) menjadi langkah strategis untuk mengurangi tingkat kerentanan wilayah.

Selain itu, aspek mitigasi bencana perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah melalui penerapan prinsip **pembangunan berketahanan bencana (*disaster resilient development*)**. Integrasi tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang berbasis risiko bencana, penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas data spasial kebencanaan, serta pengembangan kapasitas masyarakat melalui edukasi, simulasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu mewujudkan wilayah yang lebih aman, tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki karakteristik fisik dan geologi kompleks sehingga berpotensi mengalami berbagai jenis bencana alam, baik yang bersumber dari proses geologi maupun hidrometeorologi. Posisi geografis wilayah yang berada pada kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif, didukung oleh kondisi topografi yang didominasi pegunungan, perbukitan, dataran pesisir, serta jaringan sungai yang berkembang dari daerah hulu menuju wilayah pantai, menyebabkan Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan secara komprehensif dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, penataan ruang, pengembangan infrastruktur, maupun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan **Data Informasi Bencana Indonesia** yang dikelola oleh **Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2024**, jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu meliputi **banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuifaksi, tanah longsor, tsunami**, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Keragaman jenis ancaman tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki karakteristik **multi hazard**, yaitu wilayah yang menghadapi lebih dari satu jenis ancaman bencana secara bersamaan sebagai akibat interaksi kondisi geologi, geomorfologi, hidrologi, klimatologi, dan dinamika lingkungan pesisir.

Dari aspek geologi, Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik regional di bagian timur Indonesia. Berdasarkan **Katalog Tsunami Indonesia Tahun 416–2021** yang diterbitkan oleh **Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2023**, Provinsi Maluku Utara memiliki sejarah kejadian tsunami yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas gempa bumi tektonik maupun aktivitas vulkanik bawah laut. Salah satu peristiwa tsunami yang tercatat berada pada lokasi yang relatif dekat dengan Kabupaten Pulau Taliabu adalah kejadian **24 Januari 1965** di wilayah



Kepulauan Sula, yang secara geografis berbatasan langsung dengan bagian selatan Kabupaten Pulau Taliabu. Riwayat kejadian tersebut menunjukkan bahwa kawasan pesisir selatan Pulau Taliabu memiliki potensi terdampak tsunami apabila terjadi gempa bumi besar yang bersumber dari sistem sesar aktif maupun zona subduksi di kawasan Laut Banda dan sekitarnya.

Selain potensi tsunami, keberadaan sistem sesar aktif di sekitar wilayah selatan Pulau Taliabu juga meningkatkan potensi terjadinya **gempa bumi tektonik**. Aktivitas kegempaan tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur, tetapi juga dapat memicu bencana ikutan (*secondary hazards*), seperti longsor, likuifaksi pada kondisi geologi tertentu, serta tsunami apabila pusat gempa berada di bawah laut. Oleh karena itu, aspek mitigasi gempa bumi perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya melalui penerapan standar bangunan tahan gempa, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.

Di samping ancaman geologi, Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap **bencana hidrometeorologi**, terutama banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan abrasi pantai. Curah hujan yang relatif tinggi, keberadaan daerah tangkapan air di kawasan pegunungan, kondisi lereng yang curam, serta berkembangnya permukiman di sepanjang daerah aliran sungai menyebabkan beberapa wilayah memiliki risiko yang cukup besar terhadap kejadian banjir maupun banjir bandang. Pada kawasan pesisir, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi dipengaruhi oleh dinamika oseanografi Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Seram yang secara periodik mengalami peningkatan tinggi gelombang pada musim barat maupun musim timur.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko **InaRisk BNPB Tahun 2024**, hampir seluruh jenis ancaman bencana utama terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu. Namun demikian, **letusan gunung api merupakan satu-satunya jenis ancaman yang tidak termasuk dalam kategori bahaya di Kabupaten Pulau Taliabu**, mengingat wilayah ini tidak memiliki gunung api aktif maupun berada pada zona pengaruh langsung aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut membedakan Kabupaten Pulau Taliabu dengan beberapa wilayah lain di Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap erupsi gunung api.

Keberadaan berbagai ancaman bencana tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu harus menerapkan pendekatan **pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR)**. Integrasi aspek kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengelolaan kawasan lindung, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan ketangguhan wilayah sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

Sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana, tingkat kerawanan Kabupaten Pulau Taliabu selanjutnya dianalisis melalui **Indeks Bahaya Bencana** yang disusun oleh BNPB. Indeks tersebut menggambarkan tingkat potensi bahaya masing-masing jenis bencana berdasarkan karakteristik fisik wilayah, kondisi lingkungan, serta faktor-faktor pemicu bencana. Analisis indeks bahaya beserta distribusi kelas kerawanan dan persentase luas wilayah yang terdampak menjadi dasar dalam penyusunan prioritas penanggulangan bencana serta pengembangan kebijakan pembangunan yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

a. Kerawanan Banjir

Berikut narasi yang telah diperkuat dengan gaya ilmiah, akademis, analitis, dan sesuai dengan penulisan dokumen **RPJMD, RTRW, KLHS, maupun RAD Penanggulangan Kemiskinan**.



Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Banjir**, tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah sebagai akibat perbedaan karakteristik topografi, hidrologi, geomorfologi, serta kondisi penggunaan lahan. Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terkonsentrasi pada **Kecamatan Taliabu Utara**, yang memiliki **persentase kawasan rawan banjir sebesar 22,93%** dari total luas wilayah kecamatan. Tingginya tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan dataran rendah, kepadatan jaringan sungai, serta berkembangnya kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi di sekitar daerah aliran sungai dan wilayah pesisir. Selain itu, posisi Kecamatan Taliabu Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah juga meningkatkan eksposur terhadap potensi kerugian apabila terjadi bencana banjir.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Timur**, dengan **persentase kawasan rawan banjir sebesar 19,64%**. Kerawanan banjir pada kecamatan ini dipengaruhi oleh kombinasi antara kondisi topografi yang relatif landai pada kawasan pesisir, tingginya curah hujan musiman, serta sistem drainase alami yang dipengaruhi oleh beberapa daerah tangkapan air di bagian hulu. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kawasan memiliki potensi genangan yang cukup tinggi, terutama pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang bersamaan dengan pasang air laut.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** memiliki tingkat kerawanan banjir paling rendah dengan **persentase kawasan rawan banjir sebesar 4,19%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut berkaitan dengan karakteristik fisiografi wilayah yang relatif lebih didominasi oleh kawasan perbukitan serta luas dataran banjir yang lebih terbatas dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi geomorfologi tersebut menyebabkan kapasitas drainase alami relatif lebih baik sehingga potensi genangan dan limpasan permukaan menjadi lebih kecil.

Perbedaan tingkat kerawanan banjir antar kecamatan menunjukkan bahwa karakteristik fisik wilayah merupakan faktor utama yang memengaruhi distribusi risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan banjir perlu disusun secara **spasial dan berbasis risiko (risk-based spatial planning)** dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing kecamatan. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya Kecamatan Taliabu Utara dan Kecamatan Taliabu Timur, perlu diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan kapasitas sistem drainase, rehabilitasi daerah tangkapan air, konservasi kawasan resapan, serta penguatan sistem peringatan dini. Sementara itu, pada wilayah dengan tingkat kerawanan yang relatif rendah tetap diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan fungsi ekologis agar kondisi kerawanan tidak meningkat akibat perubahan penggunaan lahan di masa mendatang.

KERAWANAN TERHADAP BANJIR DI KABUPATEN PULAU TALIBU

Kerawanan terhadap banjir menunjukkan potensi suatu wilayah mengalami banjir berdasarkan kondisi fisik, hidrologi, dan tutupan lahan.



KELAS KERAWANAN

● Tinggi	Potensi banjir tinggi
● Sedang	Potensi banjir sedang
● Rendah	Potensi banjir rendah

1 TALIABU BARAT



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	358.23	0.74
● Sedang	2999.34	6.16
● Rendah	3664.55	7.53

Jumlah (Ha)
7022.12 **14.43%**

2 TALIABU SELATAN



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	573.84	1.18
● Sedang	3350.49	6.89
● Rendah	3814.76	7.84

Jumlah (Ha)
7739.09 **15.91%**

3 TABONA



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	112.12	0.23
● Sedang	771.02	1.58
● Rendah	1153.49	2.37

Jumlah (Ha)
2036.63 **4.19%**

4 TALIABU TIMUR SELATAN



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	38.56	0.08
● Sedang	1688.43	3.47
● Rendah	3148.38	6.47

Jumlah (Ha)
4875.38 **10.02%**

5 TALIABU TIMUR



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	364.94	0.75
● Sedang	4622.72	9.50
● Rendah	4567.17	9.39

Jumlah (Ha)
9554.83 **19.64%**

6 TALIABU UTARA



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	590.24	1.21
● Sedang	4271.89	8.78
● Rendah	6295.77	12.94

Jumlah (Ha)
11157.90 **22.93%**

★ **Persentase Tertinggi**

7 LEDE



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	557.85	1.15
● Sedang	1689.43	3.47
● Rendah	1418.40	2.92

Jumlah (Ha)
3665.68 **7.53%**

8 TALIABU BARAT LAUT



Indeks Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	320.00	0.66
● Sedang	1172.34	2.41
● Rendah	1111.72	2.28

Jumlah (Ha)
2604.05 **5.35%**



TOTAL KABUPATEN PULAU TALIBU

Total Luas
Seluruh Kelas Kerawanan
48,656 Ha

Persentase Total
Terhadap Luas Wilayah
100%



RINGKASAN TEMUAN



Persentase kerawanan tertinggi terdapat di Kecamatan Taliabu Utara sebesar 22.93%.



Kecamatan Taliabu Timur menempati urutan kedua dengan persentase 19.64%.



Kecamatan Tabona memiliki persentase kerawanan banjir paling rendah sebesar 4.19%.



Sumber: InaRISK BNPB, 2024 (diolah)



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

b. Kerawanan Banjir Bandang

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Banjir Bandang**, tingkat kerawanan bencana banjir bandang di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik fisiografi wilayah, meliputi kemiringan lereng, bentuk lahan, kepadatan jaringan sungai, kondisi daerah tangkapan air, curah hujan, serta perubahan penggunaan lahan yang memengaruhi besarnya limpasan permukaan (*surface runoff*). Banjir bandang umumnya terjadi pada daerah yang memiliki kombinasi lereng curam, kapasitas infiltrasi tanah yang rendah, serta alur sungai yang menerima limpasan air secara cepat dari kawasan hulu.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan banjir bandang tertinggi**, yaitu mencapai **30,97%** dari total luas wilayah kecamatan. Tingginya tingkat kerawanan tersebut berkaitan dengan keberadaan kawasan pegunungan sebagai daerah tangkapan hujan utama, jaringan sungai yang relatif rapat, serta karakteristik topografi yang menyebabkan aliran permukaan terkonsentrasi menuju dataran yang lebih rendah. Selain faktor alami, perubahan tutupan lahan pada beberapa bagian daerah aliran sungai juga berpotensi meningkatkan debit puncak sungai pada saat hujan berintensitas tinggi sehingga memperbesar risiko terjadinya banjir bandang.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Selatan**, dengan **persentase kawasan rawan banjir bandang sebesar 16,63%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seperlima wilayah kecamatan memiliki potensi terdampak banjir bandang. Kerawanan ini dipengaruhi oleh keberadaan daerah hulu yang berbukit, sistem drainase alami yang bermuara ke kawasan dataran rendah, serta tingginya intensitas curah hujan musiman yang mampu meningkatkan volume limpasan dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, khususnya pada kawasan permukiman, jaringan jalan, serta fasilitas publik yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

Sebaliknya, **Kecamatan Taliabu Timur** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan banjir bandang paling rendah**, yaitu sebesar **4,28%** dari total luas wilayahnya. Rendahnya persentase tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik fisiografi wilayah relatif lebih mendukung proses pengaliran air secara alami, sehingga potensi terbentuknya aliran permukaan yang bersifat destruktif lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Meskipun demikian, keberadaan kawasan rawan tetap memerlukan perhatian melalui pengelolaan tata ruang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Perbedaan tingkat kerawanan banjir bandang antar kecamatan menunjukkan bahwa faktor **topografi, kondisi hidrologi, karakteristik daerah aliran sungai, serta perubahan penggunaan lahan** merupakan determinan utama dalam pembentukan tingkat risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, strategi mitigasi perlu disusun secara **spasial** dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama Kecamatan **Taliabu Utara** dan **Taliabu Selatan**. Upaya mitigasi tersebut meliputi rehabilitasi daerah tangkapan air, konservasi kawasan hulu, pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*). Di samping itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan penyusunan rencana kontinjensi menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi potensi banjir bandang di masa mendatang.



KERAWANAN TERHADAP BANJIR BANDANG DI KABUPATEN PULAU TALIABU

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan arus yang deras, biasanya terjadi di daerah pegunungan atau lereng curam akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat.

KELAS KERAWANAN

- **TINGGI** Potensi banjir bandang tinggi
- **SEDANG** Potensi banjir bandang sedang
- **RENDAH** Potensi banjir bandang rendah

1 TALIABU BARAT



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	1066,79	8,60
● Sedang	252,41	2,03
● Rendah	127,40	1,03

Jumlah (Ha)
1.446,60 11,66%

2 TALIABU SELATAN



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	1.416,90	11,42
● Sedang	421,36	3,40
● Rendah	224,26	1,81

Jumlah (Ha)
2.062,52 16,63%

3 TABONA



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	841,90	6,79
● Sedang	249,88	2,01
● Rendah	110,91	0,89

Jumlah (Ha)
1.202,69 9,70%

4 TALIABU TIMUR SELATAN



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	570,15	4,60
● Sedang	146,41	1,18
● Rendah	68,88	0,56

Jumlah (Ha)
785,44 6,33%

5 TALIABU TIMUR



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	356,05	2,87
● Sedang	123,97	1,00
● Rendah	50,70	0,41

Jumlah (Ha)
530,72 4,28%

★ **Persentase Terendah**

6 TALIABU UTARA



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	2.929,54	23,62
● Sedang	627,68	5,06
● Rendah	283,90	2,29

Jumlah (Ha)
3.841,12 30,97%

★ **Persentase Tertinggi**

7 LEDE



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	1.256,98	10,13
● Sedang	311,26	2,51
● Rendah	122,72	0,99

Jumlah (Ha)
1.690,96 13,63%

8 TALIABU BARAT LAUT



Kelas Kerawanan	Luas (Ha)	%
● Tinggi	557,56	4,50
● Sedang	192,19	1,55
● Rendah	94,18	0,76

Jumlah (Ha)
843,93 6,80%

RINGKASAN KABUPATEN



TOTAL LUAS
SELURUH KELAS KERAWANAN

12.404 Ha

PERSENTASE TOTAL
TERHADAP LUAS WILAYAH

100%

SEBARAN KELAS KERAWANAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU



TINGGI

**9.995,87 Ha
80,62%**



SEDANG

**2.325,16 Ha
18,74%**



RENDAH

**682,97 Ha
5,51%**



CATATAN PENTING

Kecamatan Taliabu Utara memiliki persentase indeks kerawanan tertinggi sebesar 30,97%, diikuti oleh Kecamatan Taliabu Selatan sebesar 16,63%. Sementara itu, Kecamatan Taliabu Timur memiliki persentase kerawanan paling sedikit yaitu 4,28%.



MITIGASI YANG DIANJURKAN

- ✓ Melakukan penghijauan dan konservasi di daerah hulu
- ✓ Meningkatkan sistem peringatan dini banjir bandang
- ✓ Menjaga kebersihan sungai dan saluran air
- ✓ Menata ruang sesuai tingkat kerawanan

Sumber: InaRISK BNBP, 2024 (diolah)

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



c. Kerawanan Cuaca Ekstrem

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Cuaca Ekstrem**, tingkat kerawanan cuaca ekstrem di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan distribusi spasial yang berbeda pada setiap kecamatan. Variasi tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik geografis, kondisi topografi, kedekatan dengan kawasan pesisir, pola sirkulasi atmosfer, intensitas curah hujan, serta pengaruh angin musiman yang berkembang di wilayah kepulauan. Cuaca ekstrem di Kabupaten Pulau Taliabu umumnya berupa hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung lokal, petir, serta gelombang tinggi yang sering terjadi pada periode musim barat maupun masa transisi (pancaroba).

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** memiliki **tingkat kerawanan cuaca ekstrem tertinggi**, dengan persentase kawasan rawan mencapai **27,07%** dari total luas wilayah kabupaten yang termasuk dalam kategori rawan. Tingginya tingkat kerawanan tersebut berkaitan dengan posisi geografis kecamatan yang berhadapan langsung dengan **Laut Maluku**, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh dinamika atmosfer dan oseanografi, seperti angin monsun, pembentukan awan konvektif, hujan lebat, serta peningkatan tinggi gelombang laut. Selain itu, kombinasi antara wilayah pesisir dan kawasan perbukitan di bagian selatan kecamatan turut meningkatkan kompleksitas proses meteorologis yang memicu terjadinya cuaca ekstrem.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, yang memiliki **persentase kawasan rawan cuaca ekstrem sebesar 17,43%**. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir yang terbuka terhadap pengaruh angin laut, serta keberadaan kawasan perbukitan yang berpotensi meningkatkan proses pembentukan hujan orografis. Pada periode tertentu, terutama saat musim barat, wilayah ini berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai angin kencang sehingga dapat mengganggu aktivitas transportasi, pertanian, dan perikanan.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan cuaca ekstrem paling rendah**, yaitu sebesar **5,21%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut menunjukkan bahwa secara relatif kondisi fisiografi dan posisi geografis wilayah memberikan tingkat paparan yang lebih kecil terhadap kejadian cuaca ekstrem dibandingkan kecamatan lainnya. Meskipun demikian, perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem mengharuskan seluruh wilayah tetap memperkuat kesiapsiagaan dan sistem mitigasi bencana.

Perbedaan tingkat kerawanan cuaca ekstrem antar kecamatan menunjukkan bahwa karakteristik geografis dan kondisi lingkungan fisik merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat risiko bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, strategi mitigasi perlu dilakukan melalui pendekatan **pengurangan risiko bencana berbasis wilayah (spatial disaster risk reduction)** dengan memberikan prioritas pada kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Utara** dan **Kecamatan Taliabu Barat**. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem informasi dan peringatan dini cuaca (*early warning system*), peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem, pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan perlindungan kawasan pesisir, serta pengelolaan tata ruang yang mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana.

Integrasi informasi mengenai kerawanan cuaca ekstrem ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim (*climate-resilient development*). Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan, khususnya pada sektor permukiman, infrastruktur, transportasi, pertanian, dan perikanan, dapat disusun secara lebih adaptif sehingga mampu mengurangi tingkat kerentanan masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak bencana hidrometeorologi di masa mendatang.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

d. Kerawanan Gelombang dan Abrasi

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Gelombang Ekstrem dan Abrasi**, tingkat kerawanan wilayah pesisir di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh karakteristik oseanografi, morfologi pantai, arah datang gelombang, dinamika arus laut, serta kondisi tutupan vegetasi pesisir. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh **Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Seram**, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki garis pantai yang panjang sehingga sebagian wilayah pesisir memiliki tingkat paparan yang tinggi terhadap gelombang laut, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Timur** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan gelombang ekstrem dan abrasi tertinggi**, yaitu mencapai **23,41%** dari total kawasan rawan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh posisi geografis kecamatan yang berhadapan langsung dengan perairan terbuka sehingga lebih terpapar terhadap energi gelombang, angin musiman, serta dinamika arus laut. Selain itu, keberadaan permukiman dan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan pesisir meningkatkan tingkat eksposur terhadap potensi kerusakan akibat abrasi dan gelombang tinggi.

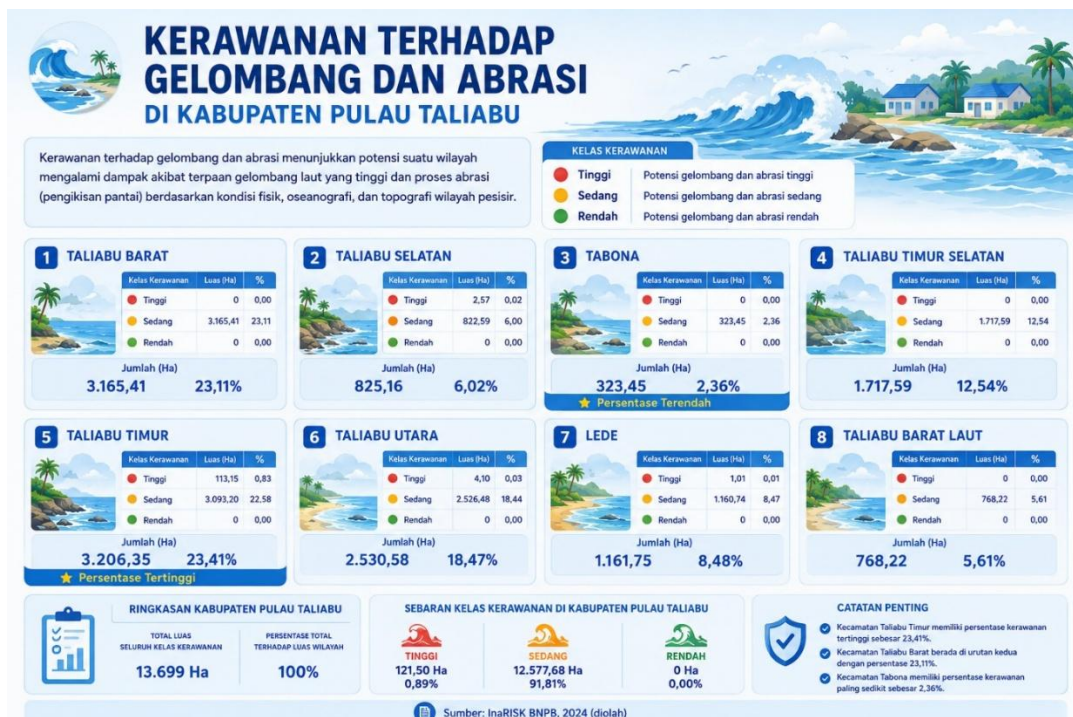
Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, yang memiliki **persentase kawasan rawan sebesar 23,11%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seperempat kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kecamatan tersebut. Tingginya tingkat kerawanan dipengaruhi oleh karakteristik garis pantai yang relatif panjang, keberadaan kawasan pesisir yang langsung berbatasan dengan laut terbuka, serta proses abrasi yang berlangsung secara alami akibat kombinasi gelombang, arus laut, dan pasang surut. Apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan pantai dan konservasi ekosistem pesisir, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur pesisir, hilangnya lahan, serta menurunkan produktivitas kawasan perikanan dan permukiman.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan gelombang ekstrem dan abrasi paling rendah**, yaitu sebesar **2,36%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik garis pantai pada wilayah ini relatif lebih terlindungi dari paparan gelombang laut secara langsung, baik karena kondisi morfologi pantai maupun keberadaan bentang alam yang berfungsi sebagai pelindung alami terhadap energi gelombang.

Perbedaan tingkat kerawanan antar kecamatan menunjukkan bahwa **karakteristik oseanografi, bentuk garis pantai, kondisi geomorfologi pesisir, serta keberadaan ekosistem pelindung seperti hutan mangrove** merupakan faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat risiko gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Pulau Taliabu. Wilayah yang memiliki garis pantai terbuka dan berhadapan langsung dengan laut lepas cenderung memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan teluk atau pesisir yang terlindungi.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Timur** dan **Kecamatan Taliabu Barat**, perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan program mitigasi bencana pesisir. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai yang ramah lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Selain itu, penerapan konsep **Integrated Coastal Zone Management (ICZM)** atau pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menjadi strategi yang penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya pesisir dan upaya konservasi lingkungan.

Integrasi informasi mengenai kerawanan gelombang ekstrem dan abrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan **pembangunan pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim (climate-resilient coastal development)**. Dengan demikian, kebijakan pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat disusun berdasarkan tingkat risiko bencana sehingga mampu mengurangi potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan dinamika oseanografi di masa mendatang.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



e. Kerawanan Gempabumi

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana **gempa bumi**. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada pada kawasan tektonik aktif di bagian timur Indonesia, tepatnya pada zona interaksi antara **Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik**. Aktivitas tektonik yang berlangsung secara terus-menerus menghasilkan deformasi kerak bumi melalui sistem sesar aktif, zona subduksi, dan proses tumbukan lempeng yang menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat aktivitas seismik yang relatif tinggi. Selain menimbulkan guncangan tanah, kejadian gempa bumi juga berpotensi memicu bencana ikutan (*secondary hazards*) seperti tsunami, tanah longsor, likuifaksi, serta kerusakan infrastruktur dan permukiman.

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Gempa Bumi**, hampir seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu termasuk ke dalam kawasan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap gempa bumi, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda pada masing-masing kecamatan. Variasi tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor geologi, kedekatan terhadap struktur sesar aktif, karakteristik litologi, kondisi topografi, serta sifat fisik tanah yang memengaruhi besarnya amplifikasi getaran gempa.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** memiliki **persentase indeks kerawanan gempa bumi tertinggi**, yaitu sebesar **27,07%** dari total kawasan rawan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya tingkat kerawanan tersebut berkaitan dengan posisi geografis kecamatan yang berada pada wilayah dengan karakteristik geologi kompleks dan berdekatan dengan struktur tektonik aktif. Selain itu, luas wilayah kecamatan yang relatif besar serta berkembangnya pusat-pusat permukiman dan aktivitas ekonomi meningkatkan tingkat eksposur terhadap potensi dampak gempa bumi.

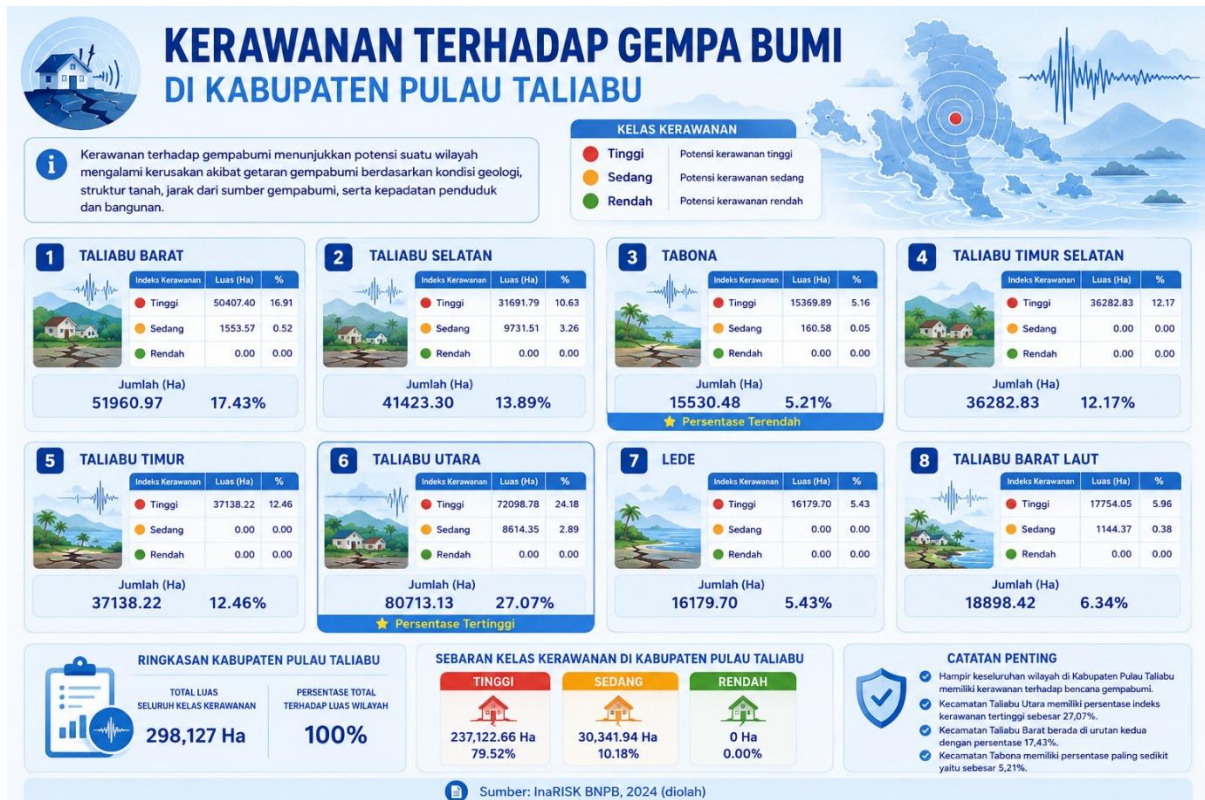
Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, yang memiliki **persentase kawasan rawan gempa bumi sebesar 17,43%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kecamatan memiliki tingkat paparan yang cukup tinggi terhadap aktivitas kegempaan. Karakteristik geologi, keberadaan kawasan berbukit, serta kondisi tanah pada beberapa lokasi berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan maupun gangguan terhadap jaringan infrastruktur apabila terjadi gempa bumi dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan gempa bumi paling rendah**, yaitu sebesar **5,21%**. Meskipun memiliki persentase yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya, kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa wilayah ini bebas dari ancaman gempa bumi. Mengingat sifat bencana gempa yang dapat dirasakan secara regional, seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu tetap memiliki tingkat risiko yang perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan penerapan standar pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan.

Perbedaan tingkat kerawanan gempa bumi antar kecamatan menunjukkan bahwa karakteristik geologi regional, kondisi struktur tektonik, serta distribusi pusat-pusat aktivitas masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat risiko bencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu dilaksanakan melalui pendekatan **mitigasi struktural dan nonstruktural**. Mitigasi struktural meliputi penerapan standar bangunan tahan gempa, penguatan infrastruktur publik, serta penyediaan fasilitas evakuasi yang memadai. Sementara itu, mitigasi nonstruktural dilakukan melalui penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi masyarakat, penyelenggaraan simulasi evakuasi, serta pengembangan sistem informasi dan peringatan dini.

Integrasi informasi kerawanan gempa bumi ke dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang **berketahanan terhadap bencana (disaster resilient)**

development). Dengan demikian, setiap perencanaan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah sehingga mampu mengurangi potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

f. Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)**, tingkat kerawanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi spasial yang dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan lahan, tutupan vegetasi, kondisi iklim, topografi, serta aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dan lahan oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana ekologis yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas ekosistem, mengganggu keanekaragaman hayati, serta memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan emisi gas rumah kaca.

Secara umum, potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu berkaitan erat dengan dominasi kawasan berhutan yang masih cukup luas, keberadaan semak belukar, lahan terbuka, serta kawasan perkebunan yang pada musim kemarau mengalami penurunan kadar air vegetasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tingkat kerentanan terhadap kebakaran apabila dipicu oleh aktivitas manusia maupun faktor alam, terutama pada periode dengan curah hujan rendah, suhu udara yang tinggi, kelembapan udara yang menurun, serta kecepatan angin yang relatif tinggi. Aktivitas pembukaan lahan, pembakaran sisa vegetasi, maupun pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi juga menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Selatan** memiliki **persentase indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan tertinggi**, yaitu sebesar **29,02%** dari total kawasan rawan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya tingkat kerawanan tersebut mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki kombinasi karakteristik biofisik dan penggunaan lahan yang lebih rentan terhadap terjadinya



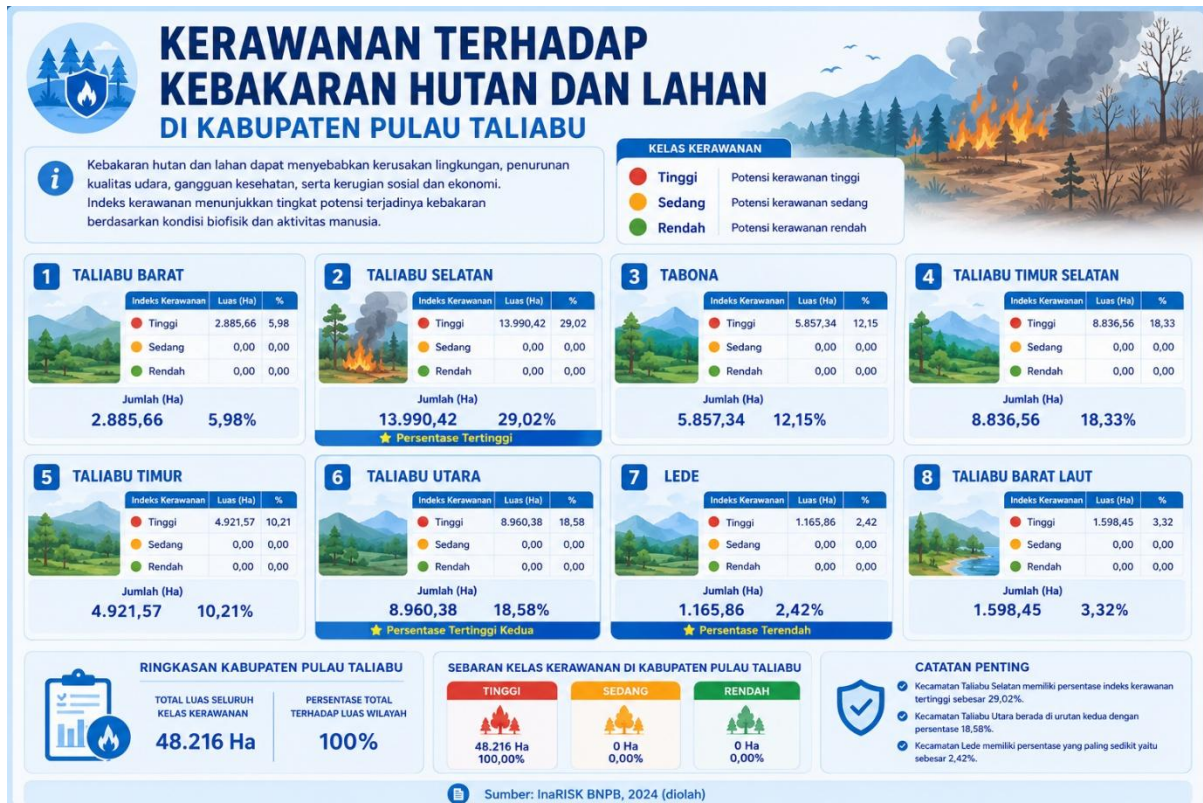
kebakaran. Luasnya kawasan vegetasi alami, keberadaan lahan semak dan perkebunan, serta aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian risiko kebakaran.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Utara**, yang memiliki **persentase kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebesar 18,58%**. Sebagai salah satu kecamatan dengan kawasan hutan yang relatif luas, wilayah ini memiliki potensi kebakaran yang cukup besar apabila terjadi kondisi cuaca kering yang berkepanjangan maupun aktivitas pembukaan lahan yang tidak terkendali. Selain berdampak terhadap kerusakan ekosistem, kejadian kebakaran pada kawasan ini juga berpotensi mengganggu fungsi daerah tangkapan air, menurunkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi pada musim hujan.

Sebaliknya, **Kecamatan Lede** memiliki **persentase indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan paling rendah**, yaitu sebesar **2,42%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tutupan lahan, kondisi vegetasi, serta faktor lingkungan pada wilayah ini relatif lebih mendukung dalam menekan potensi terjadinya kebakaran. Namun demikian, rendahnya tingkat kerawanan tidak berarti wilayah tersebut bebas dari ancaman kebakaran, sehingga upaya pengawasan dan pengelolaan kawasan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Perbedaan tingkat kerawanan antar kecamatan menunjukkan bahwa distribusi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulau Taliabu sangat dipengaruhi oleh **karakteristik tutupan lahan, kondisi iklim lokal, aktivitas pemanfaatan lahan, serta tingkat tekanan terhadap kawasan hutan**. Oleh karena itu, strategi pengurangan risiko kebakaran perlu diarahkan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Selatan** dan **Kecamatan Taliabu Utara**, melalui penguatan sistem deteksi dini kebakaran, patroli terpadu kawasan hutan, pengendalian pembukaan lahan dengan cara membakar, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, mitigasi kebakaran hutan dan lahan juga perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan kawasan hutan lindung, konservasi daerah tangkapan air, pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam menjaga fungsi ekologis kawasan hutan sekaligus mengurangi risiko bencana kebakaran di Kabupaten Pulau Taliabu. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana, berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

g. Kerawanan Kekeringan

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Kekeringan**, tingkat kerawanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi spasial yang dipengaruhi oleh karakteristik iklim, kondisi hidrologi, topografi, penggunaan lahan, serta kapasitas wilayah dalam menyimpan dan menyediakan sumber daya air. Kekeringan merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Dampak kekeringan tidak hanya memengaruhi ketersediaan air bersih, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada sumber daya air.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** memiliki **persentase indeks kerawanan kekeringan tertinggi**, yaitu sebesar **27,07%** dari total kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya persentase tersebut dipengaruhi oleh **luas wilayah kecamatan yang merupakan salah satu yang terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu**, sehingga secara spasial memiliki cakupan kawasan rawan yang lebih luas dibandingkan kecamatan lainnya. Selain faktor luas wilayah, karakteristik penggunaan lahan, distribusi sumber daya air, serta variasi curah hujan musiman juga turut memengaruhi tingkat kerawanan terhadap kekeringan.

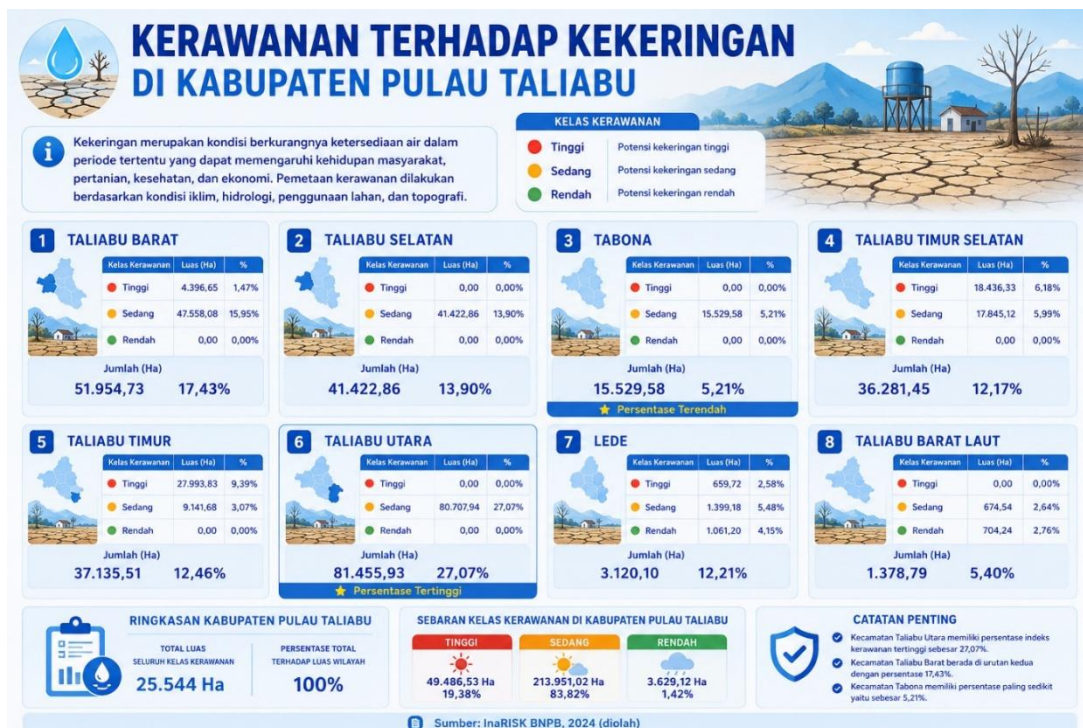
Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, dengan **persentase kawasan rawan kekeringan sebesar 17,43%**. Besarnya proporsi kawasan rawan di kecamatan ini juga berkaitan dengan luas wilayah administrasi yang relatif besar serta keberadaan beberapa kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air permukaan maupun air tanah pada musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan aktivitas pertanian lahan kering, penyediaan air bersih, serta kegiatan ekonomi masyarakat apabila terjadi musim kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** memiliki **persentase indeks kerawanan kekeringan paling rendah**, yaitu sebesar **5,21%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut mengindikasikan bahwa secara relatif wilayah ini memiliki cakupan kawasan rawan yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh ukuran wilayah administrasi yang lebih terbatas, distribusi sumber daya air yang relatif lebih baik, maupun karakteristik fisik wilayah yang lebih mendukung ketersediaan air sepanjang tahun.

Perlu dipahami bahwa **besarnya persentase kerawanan pada masing-masing kecamatan tidak semata-mata menunjukkan tingkat bahaya yang lebih tinggi**, tetapi juga dipengaruhi oleh **luas wilayah administrasi** yang menjadi dasar perhitungan luas kawasan rawan. Oleh karena itu, interpretasi hasil indeks kerawanan perlu mempertimbangkan baik faktor biofisik maupun faktor spasial sehingga tidak hanya berorientasi pada besarnya persentase, tetapi juga pada karakteristik lingkungan yang memengaruhi terbentuknya risiko kekeringan.

Dari perspektif pengelolaan wilayah, daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama **Kecamatan Taliabu Utara** dan **Kecamatan Taliabu Barat**, perlu menjadi prioritas dalam upaya pengurangan risiko kekeringan melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, perlindungan kawasan resapan, rehabilitasi daerah aliran sungai, konservasi hutan, pengembangan embung dan sistem penampungan air hujan, serta peningkatan efisiensi penggunaan air pada sektor pertanian dan permukiman. Di samping itu, penguatan sistem informasi iklim, pemantauan musim kemarau, serta penerapan teknologi konservasi air menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.

Integrasi informasi mengenai kerawanan kekeringan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari penerapan konsep **pembangunan berketahanan iklim (climate-resilient development)**. Dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan kekeringan dalam penyusunan kebijakan tata ruang, pengembangan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan lingkungan, menjamin keberlanjutan penyediaan air bagi masyarakat, serta mengurangi potensi kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana kekeringan di masa mendatang.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu



h. Kerawanan Likuifaksi

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Likuifaksi**, tingkat kerawanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi spasial yang dipengaruhi oleh kondisi geologi, jenis material penyusun tanah, karakteristik sedimen permukaan, kedalaman muka air tanah, serta intensitas aktivitas seismik. Likuifaksi merupakan fenomena geoteknik yang terjadi ketika lapisan tanah berbutir halus hingga sedang yang jenuh air kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat getaran gempa bumi, sehingga tanah berperilaku menyerupai fluida. Fenomena ini dapat menyebabkan penurunan tanah (*ground settlement*), retakan permukaan, pergeseran lateral (*lateral spreading*), hingga kerusakan bangunan dan infrastruktur yang berada di atasnya.

Secara geologis, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kondisi yang mendukung terbentuknya potensi likuifaksi pada beberapa kawasan, terutama wilayah yang tersusun oleh endapan aluvial muda, sedimen pantai, serta dataran rendah dengan muka air tanah yang relatif dangkal. Kerawanan tersebut semakin meningkat karena wilayah ini berada pada kawasan tektonik aktif di bagian timur Indonesia yang memiliki potensi kejadian gempa bumi dengan intensitas sedang hingga tinggi. Oleh karena itu, wilayah dataran pesisir dan kawasan endapan sedimen lepas memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan infrastruktur maupun pengembangan kawasan permukiman.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Selatan** memiliki **persentase indeks kerawanan likuifaksi tertinggi**, yaitu sebesar **34,69%** dari total kawasan rawan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya tingkat kerawanan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah kecamatan memiliki kondisi geologi dan geoteknik yang relatif rentan terhadap fenomena likuifaksi apabila terjadi gempa bumi dengan magnitudo yang cukup besar. Keberadaan dataran aluvial, kawasan pesisir, serta endapan sedimen yang belum terkonsolidasi secara sempurna menjadi faktor utama yang meningkatkan tingkat kerawanan wilayah ini.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, yang memiliki **persentase kawasan rawan likuifaksi sebesar 22,08%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seperlima kawasan rawan likuifaksi Kabupaten Pulau Taliabu berada di kecamatan ini. Karakteristik geologi berupa endapan aluvial dan sedimen pantai yang berkembang di beberapa bagian wilayah, dikombinasikan dengan keberadaan permukiman pada dataran rendah, berpotensi meningkatkan tingkat risiko apabila terjadi guncangan gempa bumi yang kuat.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** merupakan wilayah dengan **tingkat kerawanan likuifaksi paling rendah**, yaitu sebesar **4,68%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi geologi wilayah relatif lebih stabil dengan dominasi batuan yang lebih kompak atau memiliki karakteristik geoteknik yang kurang rentan terhadap kehilangan kekuatan akibat getaran seismik. Meskipun demikian, potensi likuifaksi tetap perlu dipertimbangkan dalam setiap kegiatan pembangunan karena fenomena ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal tanah dan intensitas gempa yang terjadi.

Perbedaan tingkat kerawanan likuifaksi antar kecamatan menunjukkan bahwa **kondisi geologi, jenis tanah, karakteristik sedimen permukaan, serta kedalaman muka air tanah** merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana ini. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan daerah perlu mengintegrasikan informasi kerawanan likuifaksi ke dalam perencanaan tata ruang, khususnya pada kawasan yang akan dikembangkan sebagai pusat permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur strategis.

Dalam perspektif mitigasi bencana, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Selatan** dan **Kecamatan Taliabu Barat**, perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan kajian geoteknik secara lebih rinci sebelum pembangunan dilakukan. Upaya mitigasi dapat berupa penerapan standar bangunan tahan gempa, investigasi kondisi tanah pada lokasi pembangunan, penguatan fondasi pada kawasan dengan tanah lunak, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan berisiko

tinggi, serta penyusunan peta mikrozonasi gempa dan likuifaksi. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, dan penguatan sistem kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam mengurangi potensi kerugian akibat bencana likuifaksi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Integrasi informasi kerawanan likuifaksi ke dalam kebijakan pembangunan berbasis **pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction)** merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek geologi dan geoteknik dalam setiap tahapan pembangunan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana gempa bumi beserta bahaya ikutannya, sehingga keberlanjutan pembangunan serta keselamatan masyarakat dapat terjamin secara optimal.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

i. Kerawanan Tanah Longsor

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Gempa Bumi**, tingkat kerawanan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan variasi spasial yang dipengaruhi oleh kondisi geologi regional, karakteristik litologi, struktur tektonik, serta kondisi geomorfologi wilayah. Sebagai bagian dari kawasan tektonik aktif di Indonesia timur, Kabupaten Pulau Taliabu berada pada zona yang dipengaruhi oleh interaksi **Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik**, sehingga memiliki potensi aktivitas seismik yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki tingkat paparan terhadap ancaman gempa bumi, meskipun dengan tingkat kerawanan yang berbeda pada masing-masing kecamatan.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** memiliki **persentase indeks kerawanan gempa bumi tertinggi**, yaitu sebesar **29,81%** dari total kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya proporsi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik geologi yang lebih rentan terhadap aktivitas seismik, tetapi juga oleh luas wilayah administrasi Kecamatan Taliabu Utara yang relatif besar dibandingkan kecamatan lainnya. Kombinasi antara kondisi



fisiografi, keberadaan struktur geologi aktif, serta distribusi kawasan permukiman menjadikan kecamatan ini sebagai salah satu wilayah prioritas dalam upaya mitigasi risiko gempa bumi.

Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Barat**, yang memiliki **persentase kawasan rawan gempa bumi sebesar 19,04%**. Besarnya proporsi kawasan rawan pada kecamatan ini berkaitan dengan karakteristik geologi yang didominasi oleh satuan batuan tua, kondisi topografi berbukit, serta keberadaan beberapa kawasan yang berpotensi mengalami amplifikasi getaran akibat kondisi tanah setempat. Selain itu, luas wilayah administrasi yang cukup besar turut memengaruhi besarnya luas kawasan yang termasuk dalam kelas kerawanan gempa bumi.

Sebaliknya, **Kecamatan Lede** memiliki **persentase indeks kerawanan gempa bumi paling rendah**, yaitu sebesar **4,70%**. Rendahnya persentase tersebut mengindikasikan bahwa secara spasial cakupan kawasan yang dikategorikan rawan gempa bumi relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Kecamatan Lede terbebas dari ancaman gempa bumi, mengingat karakter gempa tektonik bersifat regional sehingga seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu tetap memiliki potensi terdampak apabila terjadi kejadian gempa dengan magnitudo besar.

Perbedaan tingkat kerawanan gempa bumi antar kecamatan menunjukkan bahwa **faktor luas wilayah, karakteristik geologi, struktur tektonik, kondisi topografi, dan sifat geoteknik tanah** merupakan determinan utama yang memengaruhi distribusi tingkat kerawanan di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, interpretasi terhadap persentase indeks kerawanan perlu mempertimbangkan aspek spasial dan karakteristik biofisik wilayah sehingga tidak hanya didasarkan pada besarnya luas kawasan rawan, tetapi juga pada tingkat eksposur penduduk, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang berada di dalamnya.

Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Utara dan Kecamatan Taliabu Barat**, perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan program mitigasi gempa bumi. Strategi mitigasi meliputi penerapan standar bangunan tahan gempa sesuai ketentuan teknis nasional, penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, penguatan infrastruktur vital, penyediaan jalur dan tempat evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan. Selain itu, kajian mikrozonasi gempa perlu dilakukan secara lebih rinci sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian lokasi pembangunan infrastruktur strategis dan kawasan permukiman.

Integrasi informasi kerawanan gempa bumi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dari implementasi **pembangunan berketahanan bencana (*disaster resilient development*)**. Dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan dalam setiap kebijakan pembangunan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman gempa bumi, meminimalkan potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang aman, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika kebencanaan.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

j. Kerawanan Tsunami

Kabupaten Pulau Taliabu merupakan salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana **tsunami** sebagai konsekuensi dari posisi geografisnya yang berada pada kawasan tektonik aktif di bagian timur Indonesia. Wilayah ini berada di sekitar zona interaksi antara **Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik**, yang membentuk sistem sesar aktif dan zona subduksi sebagai sumber utama aktivitas seismik regional. Gempa bumi tektonik yang terjadi di kawasan Laut Maluku, Laut Banda, maupun perairan di sekitar Kepulauan Sula berpotensi memicu gelombang tsunami yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap wilayah pesisir Kabupaten Pulau Taliabu.

Karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan dengan garis pantai yang panjang menyebabkan sebagian besar kawasan pesisir memiliki tingkat paparan terhadap ancaman tsunami. Risiko tersebut semakin meningkat pada wilayah dataran pantai yang memiliki elevasi rendah, kepadatan permukiman yang tinggi, serta aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di kawasan pesisir. Oleh karena itu, ancaman tsunami tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya magnitudo gempa bumi, tetapi juga oleh karakteristik morfologi pantai, bentuk teluk, kedalaman perairan, dan tingkat keterpaparan penduduk maupun infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisis **Indeks Kerawanan Tsunami**, hampir seluruh wilayah pesisir Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana tsunami dengan tingkat kerentanan yang berbeda pada masing-masing kecamatan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa **Kecamatan Taliabu Utara** memiliki **persentase indeks kerawanan tsunami tertinggi**, yaitu sebesar **25,45%** dari total kawasan rawan tsunami di Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah pesisir yang cukup besar, posisi geografis yang berhadapan langsung dengan Laut Maluku, serta keberadaan permukiman dan aktivitas ekonomi pada kawasan pantai yang meningkatkan tingkat eksposur terhadap ancaman tsunami.



Wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi berikutnya adalah **Kecamatan Taliabu Timur**, yang memiliki **persentase kawasan rawan tsunami sebesar 22,54%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seperlima kawasan rawan tsunami di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kecamatan ini. Tingginya tingkat kerawanan dipengaruhi oleh keberadaan garis pantai yang panjang, morfologi pesisir yang relatif landai pada beberapa lokasi, serta posisi wilayah yang secara langsung berhadapan dengan perairan terbuka sehingga memiliki tingkat paparan yang lebih besar terhadap propagasi gelombang tsunami.

Sebaliknya, **Kecamatan Tabona** memiliki **persentase indeks kerawanan tsunami paling rendah**, yaitu sebesar **0,80%**. Rendahnya tingkat kerawanan tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wilayah kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan tsunami. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik fisiografi wilayah yang didominasi kawasan daratan yang relatif lebih tinggi serta keterbatasan panjang garis pantai yang langsung terpapar terhadap gelombang tsunami. Meskipun demikian, potensi ancaman tsunami tetap perlu diantisipasi mengingat sifat bencana ini yang dapat memberikan dampak luas terhadap kawasan pesisir.

Perbedaan tingkat kerawanan tsunami antar kecamatan menunjukkan bahwa **karakteristik garis pantai, elevasi wilayah pesisir, morfologi pantai, serta posisi geografis terhadap sumber gempa bawah laut** merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat risiko tsunami di Kabupaten Pulau Taliabu. Oleh karena itu, interpretasi indeks kerawanan tidak hanya didasarkan pada luas kawasan yang terdampak, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat eksposur penduduk, kepadatan permukiman, keberadaan fasilitas publik, serta fungsi kawasan pesisir sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, khususnya **Kecamatan Taliabu Utara** dan **Kecamatan Taliabu Timur**, perlu menjadi prioritas dalam penyusunan strategi mitigasi tsunami. Upaya mitigasi tersebut meliputi penyusunan tata ruang berbasis risiko bencana, pembangunan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, pemasangan sistem peringatan dini (*tsunami early warning system*), penyediaan rambu evakuasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi evakuasi secara berkala. Perlindungan kawasan pesisir melalui rehabilitasi ekosistem mangrove dan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi bagian penting dalam mengurangi tingkat kerentanan terhadap dampak tsunami.

Integrasi informasi mengenai kerawanan tsunami ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan implementasi dari pendekatan **pembangunan berketahanan bencana (*disaster resilient development*)**. Dengan memasukkan aspek risiko tsunami dalam setiap tahapan perencanaan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas adaptasi wilayah, melindungi masyarakat dan infrastruktur strategis, serta mewujudkan pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di kawasan pesisir.



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu

2.1.2 Kondisi Demografi Daerah

2.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi sasaran utama dari seluruh kebijakan pembangunan. Karakteristik kependudukan, seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk antarwilayah, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyediaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kondisi kependudukan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **66.985 jiwa** yang tersebar pada delapan kecamatan. Sebaran penduduk tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk masih terkumpul pada beberapa kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan ekonomi daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat perkembangan wilayah, aksesibilitas, serta ketersediaan fasilitas pelayanan publik di masing-masing kecamatan.

Kecamatan **Taliabu Barat** merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu **17.023 jiwa** atau sekitar **25,40 persen** dari total penduduk Kabupaten Pulau Taliabu. Tingginya jumlah penduduk di kecamatan ini tidak terlepas dari perannya sebagai kawasan yang mencakup **Bobong**, ibu kota kabupaten, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Keberadaan berbagai fasilitas publik tersebut menjadi faktor penarik konsentrasi penduduk sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi wilayah.

Jumlah penduduk terbesar berikutnya berada di **Kecamatan Taliabu Utara** sebanyak **15.210 jiwa**, sedangkan **Kecamatan Lede** memiliki jumlah penduduk **8.550 jiwa** dan **Kecamatan Taliabu Selatan**



sebanyak **8.456 jiwa**. Keempat kecamatan tersebut menjadi kawasan dengan konsentrasi penduduk yang relatif tinggi dan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Sebaliknya, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di **Kecamatan Tabona**, yaitu **3.563 jiwa**, diikuti **Kecamatan Taliabu Timur** sebanyak **3.632 jiwa**, yang menunjukkan karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk relatif rendah akibat kondisi geografis, aksesibilitas, dan luas kawasan permukiman yang masih terbatas.

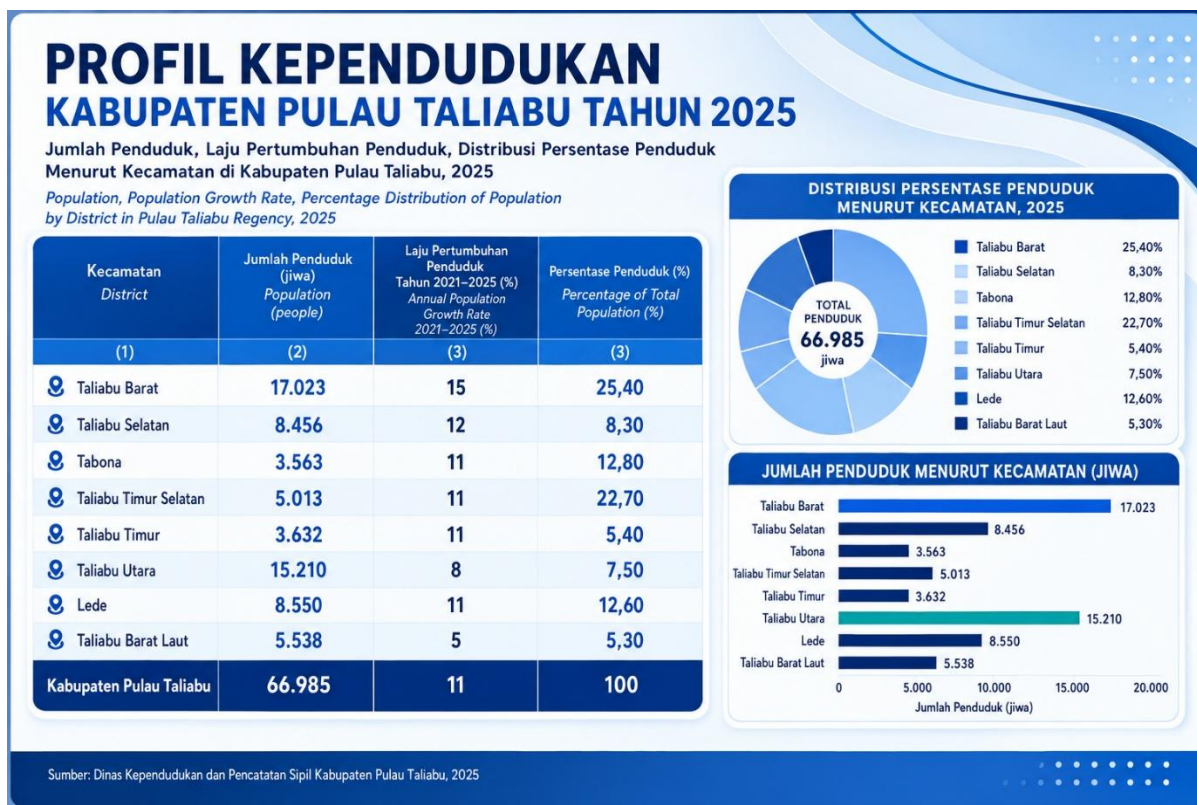
Dari aspek dinamika penduduk, laju pertumbuhan penduduk tahunan selama periode **2021–2025** menunjukkan variasi antar kecamatan. Kecamatan **Taliabu Barat** mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar **15 persen**, diikuti **Taliabu Selatan** sebesar **12 persen**, sedangkan beberapa kecamatan lainnya berada pada kisaran **11 persen**. Sementara itu, Kecamatan **Taliabu Barat Laut** menunjukkan laju pertumbuhan penduduk paling rendah, yaitu sekitar **5 persen**, sedangkan **Taliabu Utara** sebesar **8 persen**. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu selama periode tersebut mencapai sekitar **11 persen**, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan wilayah dan mobilitas penduduk.

Distribusi penduduk antar kecamatan menunjukkan bahwa sekitar seperempat penduduk Kabupaten Pulau Taliabu terkonsentrasi di Kecamatan Taliabu Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan transportasi, serta sarana ekonomi perlu terus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah penduduk relatif kecil memerlukan perhatian khusus melalui pemerataan pembangunan agar kesenjangan pelayanan publik antarwilayah dapat diminimalkan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, struktur persebaran penduduk memiliki implikasi terhadap kebutuhan penyediaan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi memerlukan kapasitas pelayanan yang lebih besar, sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk rendah umumnya menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah perlu mempertimbangkan karakteristik demografi setiap kecamatan agar alokasi sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Bagi penyusunan **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**, informasi mengenai jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan distribusi penduduk menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi program. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan penguatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif kecil memerlukan peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemerataan akses terhadap pelayanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih inklusif, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah, pemerataan pelayanan publik, serta penentuan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, merata, dan berkelanjutan.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam menggambarkan karakteristik sumber daya manusia suatu daerah. Komposisi penduduk berdasarkan umur memberikan informasi mengenai proporsi penduduk usia muda, usia produktif, dan usia lanjut yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penyediaan pelayanan dasar, perencanaan ketenagakerjaan, serta proyeksi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Analisis struktur umur penduduk juga menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi potensi bonus demografi maupun tantangan yang berkaitan dengan proses penuaan penduduk (*population ageing*).

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, jumlah penduduk mencapai 66.985 jiwa, yang terdiri atas 34.019 jiwa penduduk laki-laki (50,79 persen) dan 32.966 jiwa penduduk perempuan (49,21 persen). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, meskipun jumlah penduduk laki-laki masih sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh penduduk usia muda dan usia produktif. Kelompok umur 5–9 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 6.928 jiwa, diikuti kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 6.921 jiwa, kelompok umur 20–24 tahun sebanyak 6.749 jiwa, dan kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 6.745 jiwa. Besarnya jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki basis penduduk usia muda yang cukup besar sebagai modal pembangunan di masa mendatang.

Selanjutnya, kelompok umur 25–29 tahun hingga 44 tahun juga menunjukkan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Kelompok umur tersebut merupakan bagian dari usia produktif, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi daerah. Tingginya proporsi penduduk usia produktif memberikan peluang bagi Kabupaten Pulau Taliabu untuk memperoleh bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.



Apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja, kondisi tersebut dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, jumlah penduduk mulai mengalami penurunan pada kelompok umur 50 tahun ke atas. Kelompok umur 60–64 tahun tercatat sebanyak 1.660 jiwa, kelompok umur 65–69 tahun sebanyak 1.449 jiwa, kelompok umur 70–74 tahun sebanyak 886 jiwa, sedangkan kelompok umur 75 tahun ke atas berjumlah 1.109 jiwa. Meskipun proporsinya relatif kecil dibandingkan kelompok usia produktif, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia perlu menjadi perhatian dalam penyediaan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan kelompok rentan di masa mendatang.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur menunjukkan pola yang relatif seimbang. Pada kelompok usia anak hingga usia dewasa muda, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada beberapa kelompok umur lanjut, seperti 60–64 tahun, jumlah penduduk perempuan mulai mendekati bahkan sedikit melebihi jumlah penduduk laki-laki. Fenomena tersebut sejalan dengan kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Struktur umur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang didominasi oleh kelompok usia produktif memberikan implikasi yang sangat penting terhadap pembangunan daerah. Besarnya jumlah penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi apabila didukung oleh penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kompetensi tenaga kerja. Sebaliknya, apabila kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk usia produktif, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya.

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, struktur penduduk berdasarkan umur menjadi dasar dalam penyusunan strategi intervensi pembangunan. Kelompok usia anak memerlukan penguatan investasi pada sektor pendidikan, gizi, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Kelompok usia produktif membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan vokasi, pelatihan kerja, pengembangan usaha produktif, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, kelompok lanjut usia memerlukan penguatan sistem perlindungan sosial, pelayanan kesehatan geriatri, dan program pemberdayaan sosial agar tetap dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 menunjukkan karakteristik daerah yang masih berada pada fase dominasi penduduk usia produktif dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang. Kondisi tersebut merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, sepanjang didukung oleh kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

Data struktur penduduk merupakan salah satu indikator strategis dalam analisis kependudukan yang menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Analisis struktur penduduk diperlukan untuk mengetahui karakteristik demografi, tingkat ketergantungan penduduk, potensi tenaga kerja, serta arah kebutuhan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyajian data struktur penduduk menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu. Adapun data struktur penduduk Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulau Taliabu (jiwa), 2025

Population by Age Groups and Sex in Pulau Taliabu Regency (people), 2025

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	2.086	2.085	4.171
5–9	3.507	3.421	6.928
10–14	3.428	3.317	6.745
15–19	3.495	3.426	6.921
20–24	3.506	3.243	6.749
25–29	3.071	2.877	5.948
30–34	2.642	2.652	5.294
35–39	2.591	2.491	5.082
40–44	2.374	2.354	4.728
45–49	2.020	1.845	3.865
50–54	1.669	1.498	3.167
55–59	1.212	1.071	2.283
60–64	827	833	1.660
65–69	737	712	1.449
70–74	484	402	886
75+	586	523	1.109
Kabupaten Pulau Taliabu	34.019	32.966	66.985



Catatan/Note:

¹Data dihitung berdasarkan luas daerah yang tercantum dalam tabel 1.1.1 sebagai dasar perhitungan



Sumber/Source:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Taliabu/
Department of Population and Civil Registration of Pulau Taliabu

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Status perkawinan merupakan salah satu indikator demografi yang memberikan gambaran mengenai struktur sosial masyarakat, dinamika pembentukan keluarga, serta karakteristik penduduk menurut siklus kehidupan. Informasi mengenai status perkawinan memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, kesejahteraan keluarga, serta perencanaan program pembangunan sosial. Analisis status perkawinan juga dapat memberikan gambaran mengenai potensi kebutuhan pelayanan publik bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti keluarga muda, penduduk lanjut usia, maupun perempuan kepala keluarga.

Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, disajikan data jumlah penduduk menurut kategori belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam memahami karakteristik sosial kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, penguatan ketahanan keluarga, serta penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Adapun data penduduk menurut jenis kelamin dan status perkawinan disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, sebagian besar penduduk berada pada status belum kawin, yaitu sebanyak 34.481 jiwa, yang terdiri atas 18.558 jiwa laki-laki dan 15.923 jiwa perempuan. Besarnya jumlah penduduk yang belum menikah menunjukkan bahwa struktur demografi Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif awal, sebagaimana tercermin pada distribusi penduduk menurut kelompok umur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah masih memiliki potensi bonus demografi yang cukup besar apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja.



Penduduk dengan status kawin merupakan kelompok terbesar kedua, yaitu sebanyak 30.548 jiwa, yang terdiri atas 15.202 jiwa laki-laki dan 15.346 jiwa perempuan. Komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan pada kelompok ini mencerminkan struktur rumah tangga yang cukup stabil dan menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan keluarga, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta perlindungan sosial. Kelompok penduduk yang telah menikah umumnya merupakan kelompok usia produktif yang berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Sementara itu, jumlah penduduk dengan status cerai hidup tercatat sebanyak 351 jiwa, terdiri atas 127 laki-laki dan 224 perempuan. Jumlah perempuan yang mengalami perceraian hidup relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat perceraian, sehingga memerlukan perhatian dalam bentuk penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap kesempatan kerja.

Pada kategori cerai mati, terdapat 1.605 jiwa, yang terdiri atas 348 laki-laki dan 1.257 perempuan. Tingginya jumlah perempuan dengan status cerai mati dibandingkan laki-laki menunjukkan adanya kecenderungan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak perempuan yang menjadi janda akibat pasangan meninggal dunia. Kondisi ini juga mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia dan perempuan kepala keluarga agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan dasar, jaminan sosial, dan kegiatan ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, struktur penduduk berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa sekitar 51,48 persen penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berstatus belum kawin, sedangkan 45,60 persen telah menikah. Adapun penduduk yang berstatus cerai hidup dan cerai mati secara bersama-sama hanya mencapai sekitar 2,92 persen dari total penduduk. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa struktur sosial masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh kelompok usia muda dan keluarga produktif, yang menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, informasi mengenai status perkawinan memiliki nilai strategis dalam menentukan sasaran program pembangunan. Penduduk yang belum menikah memerlukan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja agar mampu memasuki dunia kerja secara produktif. Sementara itu, kelompok keluarga yang telah menikah memerlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, kelompok penduduk yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati, khususnya perempuan kepala keluarga, memerlukan intervensi melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan perlindungan sosial guna mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, struktur penduduk menurut status perkawinan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan karakteristik masyarakat yang masih didominasi oleh penduduk usia produktif dengan proporsi penduduk belum menikah dan telah menikah yang sangat besar. Kondisi ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kabupaten Pulau Taliabu (jiwa), 2025

Population by Gender and Marital Status in Pulau Taliabu Regency (people), 2025

Status Perkawinan Marital Status	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
 Belum Kawin / Unmarried	18.558	15.923	34.481
 Kawin / Married	15.202	15.346	30.548
 Cerai Hidup / Divorced Living	127	224	351
 Cerai Mati / Divorced Dead	348	1.257	1.605



Sumber/Source:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Taliabu/Department of Population and Civil Registration of Pulau Taliabu

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

2.1.2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kependudukan yang menggambarkan tingkat konsentrasi penduduk pada suatu wilayah berdasarkan luas wilayah administrasinya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tekanan penduduk terhadap ruang, kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar, serta distribusi pelayanan publik antarwilayah. Sementara itu, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan. Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pelayanan publik, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai persebaran penduduk berdasarkan tingkat kepadatan dan komposisi jenis kelamin di setiap kecamatan, berikut disajikan data kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025. Informasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menganalisis karakteristik demografi wilayah, tingkat konsentrasi penduduk, serta keseimbangan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, pemerataan pelayanan publik, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun data kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 22,45 jiwa per kilometer persegi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh luas wilayah yang cukup besar, karakteristik geografis berupa kawasan kepulauan, serta dominasi wilayah perbukitan dan kawasan hutan yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata.

Apabila ditinjau menurut kecamatan, Kecamatan Tabona memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 64,5 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Lede sebesar 64 jiwa/km², Kecamatan Taliabu Selatan sebesar 58,3 jiwa/km², Kecamatan Taliabu Barat sebesar 55 jiwa/km², dan Kecamatan Taliabu Barat Laut sebesar 54 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas permukiman dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat relatif



lebih terkonsentrasi pada wilayah dengan aksesibilitas yang lebih baik serta didukung oleh keberadaan pusat pelayanan masyarakat.

Sebaliknya, Kecamatan Taliabu Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah, yaitu hanya sekitar 15 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Taliabu Utara sebesar 22,5 jiwa/km² dan Kecamatan Taliabu Timur Selatan sebesar 50 jiwa/km². Rendahnya kepadatan penduduk pada beberapa wilayah tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah administrasi yang relatif besar, dominasi kawasan hutan dan perbukitan, serta keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar yang menyebabkan persebaran permukiman masyarakat lebih tersebar.

Dari aspek komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki rasio jenis kelamin sebesar 104,53, yang berarti terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, namun secara umum komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih berada dalam kondisi yang relatif seimbang.

Pada tingkat kecamatan, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Taliabu Barat Laut, yaitu sebesar 109,46, diikuti Kecamatan Taliabu Timur sebesar 108,01, dan Kecamatan Taliabu Barat sebesar 105,12. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki pada wilayah tersebut relatif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya, rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Tabona, yaitu sebesar 102,17, yang menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan relatif lebih seimbang dibandingkan kecamatan lainnya.

Perbedaan tingkat kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin antar kecamatan mencerminkan adanya variasi karakteristik wilayah, kondisi geografis, pola permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya memerlukan kapasitas pelayanan publik yang lebih besar, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaringan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur transportasi. Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah menghadapi tantangan berupa tingginya biaya penyediaan pelayanan publik akibat persebaran penduduk yang berjauhan dan aksesibilitas wilayah yang masih terbatas.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, informasi mengenai kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin memiliki nilai strategis dalam menentukan lokasi prioritas intervensi pembangunan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memerlukan peningkatan kapasitas pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan infrastruktur perkotaan. Di sisi lain, wilayah dengan kepadatan penduduk rendah memerlukan penguatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pelayanan dasar, serta pengembangan potensi ekonomi lokal agar kesenjangan pembangunan antar kecamatan dapat dikurangi.

Secara keseluruhan, karakteristik kepadatan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa persebaran penduduk masih relatif tidak merata sebagai konsekuensi dari kondisi geografis wilayah kepulauan. Meskipun demikian, komposisi penduduk menurut jenis kelamin berada dalam kondisi yang relatif seimbang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan aspek pemerataan distribusi pelayanan publik, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru guna mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan serta mempercepat pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

KEPADATAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN PENDUDUK KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

*Population Density and Population Sex Ratio
in Pulau Taliabu Regency, 2025*

Kecamatan District	Kepadatan Penduduk ¹ (jiwa/km ²) Population Density (people/sq.km)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(5)	(6)
📍 Taliabu Barat	55	105,12
📍 Taliabu Selatan	58,3	102,93
📍 Tabona	64,5	102,17
📍 Taliabu Timur Selatan	50	103,83
📍 Taliabu Timur	15	108,01
📍 Taliabu Utara	22,5	104,02
📍 Ledé	64	104,89
📍 Taliabu Barat Laut	54	109,46
Kabupaten Pulau Taliabu	22,45	104,53



Catatan/Note:

¹Data dihitung berdasarkan luas daerah yang tercantum dalam tabel 1.1.1 sebagai dasar perhitungan



Sumber/Source:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Taliabu/
Department of Population and Civil Registration
of Pulau Taliabu

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dimensi utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan yang memadai, perlindungan sosial, serta kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada proses pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan konsep multidimensional yang menggambarkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan pertama (Tanpa Kemiskinan), tujuan ketiga (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), tujuan keempat (Pendidikan Berkualitas), tujuan kedelapan (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta tujuan kesepuluh (Berkurangnya Kesenjangan). Oleh karena itu, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan sekaligus menentukan arah perencanaan pembangunan daerah pada masa mendatang.

Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu daerah kepulauan di Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, persebaran penduduk, ketersediaan infrastruktur, serta pemanfaatan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan, dan jasa. Karakteristik tersebut memberikan peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi lokal, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan berupa keterbatasan akses pelayanan dasar, rendahnya konektivitas antarwilayah, serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu dilakukan melalui berbagai kebijakan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, serta perluasan akses terhadap pelayanan publik yang



berkualitas. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dalam dokumen ini dilakukan melalui berbagai indikator makro pembangunan yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi daerah. Indikator tersebut meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta indikator-indikator sosial lainnya yang menggambarkan kualitas hidup penduduk. Analisis terhadap indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang masih perlu ditangani melalui kebijakan pembangunan yang lebih terarah.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, aspek kesejahteraan masyarakat memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi tolok ukur utama keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari menurunnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, permodalan usaha, perlindungan sosial, serta infrastruktur dasar yang memadai. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis aspek kesejahteraan masyarakat dalam dokumen ini disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai indikator sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB menggambarkan total nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, sehingga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perekonomian daerah, struktur ekonomi, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan nilai tambah regional. Dalam konteks pembangunan daerah, analisis PDRB memiliki peran strategis sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, penentuan sektor unggulan, serta perumusan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencerminkan nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Oleh karena itu, indikator ini tidak hanya menggambarkan perkembangan volume produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi). Analisis PDRB ADHB memberikan informasi mengenai besaran nominal aktivitas ekonomi daerah, struktur perekonomian, serta kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu.

Struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh sektor-sektor primer yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor utama terhadap pembentukan PDRB daerah karena sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, sektor perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintahan, transportasi, serta jasa-jasa lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha memberikan gambaran mengenai transformasi struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu selama periode pembangunan. Analisis terhadap perubahan kontribusi masing-masing sektor ekonomi dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki daya saing tinggi, potensi pertumbuhan ekonomi, serta peluang penciptaan lapangan kerja.

Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, analisis PDRB memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, peningkatan nilai PDRB tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan apabila pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi yang bersifat padat karya, berbasis potensi lokal, dan melibatkan masyarakat secara luas menjadi strategi penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025, berikut disajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB daerah, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2021–2025

*Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices
by Industry in Pulau Taliabu Regency (billion rupiahs), 2021–2025*

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	873,91	964,60	1.004,76	1.075,78	1.145,19
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	315,67	344,81	334,73	356,83	403,61
C Industri Pengolahan/Manufacturing	21,01	22,43	24,76	27,31	29,96
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,40	0,44	0,50	0,55	0,60
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,16	0,17	0,17	0,19	0,20
F Konstruksi/Construction	70,88	78,22	82,41	88,43	86,19

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	232,84	250,18	264,62	295,73	329,62
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	20,57	24,29	26,03	28,42	30,43
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1,22	1,26	1,29	1,31	1,41
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10,04	10,64	11,18	12,28	13,09
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	9,09	9,98	10,33	11,65	13,04
L Real Estat/Real Estate Activities	0,75	0,78	0,81	0,96	1,04

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	0,50	0,52	0,54	0,59	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	118,65	125,63	130,36	154,34	169,83
P	Jasa Pendidikan / Education	24,12	24,77	26,85	28,78	29,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	13,91	14,41	15,59	16,12	17,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya / Other Services Activities	3,85	3,93	4,16	4,47	4,77
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		1.717,57	1.877,04	1.939,10	2.103,76	2.276,72

**Catatan/Note:**

- * = Sementara/ Temporary
 ** = Sangat Sementara/ Very Temporary

**Sumber/Source:**

Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/
 BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). Berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, yaitu Tahun 2010, sehingga lebih mencerminkan perubahan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, indikator ini menjadi ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja pertumbuhan ekonomi daerah dari waktu ke waktu.

Analisis PDRB atas dasar harga konstan memberikan informasi mengenai perkembangan kapasitas produksi daerah, dinamika sektor-sektor ekonomi, serta kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, data ini juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi (*leading sectors*) dan sektor yang memerlukan penguatan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Selama periode Tahun 2021–2025, perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi pada berbagai sektor ekonomi sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur, meningkatnya aktivitas perdagangan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pascapemulihan pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kapasitas ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

Struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta administrasi pemerintahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. Di sisi lain, sektor-sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan jasa lainnya menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil sebagai dampak meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, analisis PDRB atas dasar harga konstan memiliki arti yang sangat penting karena mampu menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya (*real economic growth*). Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB atas dasar harga konstan perlu diarahkan agar bersifat inklusif (inclusive growth), yaitu pertumbuhan yang mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, memanfaatkan potensi lokal, serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi riil Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025, berikut disajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi, perubahan struktur perekonomian daerah, serta sektor-sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pulau Taliabu (miliar rupiah), 2021–2025

Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Pulau Taliabu Regency (billion rupiahs), 2021–2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	557,11	576,18	590,35	601,40	615,88
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	209,13	219,14	226,01	230,07	261,41
C Industri Pengolahan/Manufacturing	16,04	16,32	16,86	17,45	18,48
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,28	0,31	0,35	0,37	0,40
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15
F Konstruksi/Construction	40,20	40,98	41,56	44,34	42,79

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	164,60	170,85	176,71	197,70	213,96
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	11,86	13,18	13,36	14,57	14,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	0,84	0,85	0,85	0,84	0,87
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	8,29	8,74	8,82	9,22	9,43
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	5,58	5,62	5,73	6,40	7,01
L Real Estat/Real Estate Activities	0,54	0,54	0,55	0,62	0,66

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	81,14	81,27	82,36	93,60	99,93
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	15,34	15,62	15,88	16,49	16,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,02	9,20	9,55	9,51	9,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,72	2,77	2,81	2,94	3,10
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		1.123,14	1.162,04	1.192,22	1.246,02	1.316,18



Catatan/Note:

- Tinggi/High ($\geq 10\%$)
- Sedang/Moderate ($2\% - <10\%$)
- Rendah/Negatif ($< 2\%$)



Sumber/Source:

Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/
BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources



* = Sementara/Temporary
** = Sangat Sementara/Very Temporary

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK) menurut lapangan usaha selama periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp1.717,57 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.276,72 miliar pada tahun 2025, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari Rp1.123,14 miliar menjadi Rp1.316,18 miliar pada periode yang sama. Peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga, tetapi juga didukung oleh peningkatan aktivitas produksi riil pada berbagai sektor ekonomi.

Struktur perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, baik pada harga berlaku maupun harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah serta menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta administrasi pemerintahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi pertumbuhan riil, beberapa sektor menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, antara lain pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya diversifikasi aktivitas ekonomi yang mulai berkembang seiring meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, mobilitas masyarakat, serta kebutuhan terhadap pelayanan publik. Di sisi lain, sektor-sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan yang relatif stabil sebagai konsekuensi meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, struktur ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diversifikasi ekonomi tersebut menjadi penting untuk meningkatkan daya saing daerah, mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan PDRB perlu diarahkan agar bersifat



inklusif (*inclusive growth*), yaitu mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan. Penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, khususnya pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, dan UMKM, menjadi strategi utama untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2021–2025 menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang semakin kuat dengan tren pertumbuhan yang konsisten. Tantangan ke depan adalah mengoptimalkan potensi sektor unggulan melalui hilirisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan investasi, serta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan nilai PDRB, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.3 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengukur perkembangan aktivitas ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan persentase peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi), sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil (*real economic growth*). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendorong peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, laju pertumbuhan ekonomi memiliki arti yang sangat strategis mengingat karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer. Aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa pemerintahan. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor tersebut, kondisi infrastruktur, investasi, stabilitas harga, serta perkembangan perekonomian nasional dan regional.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang positif. Meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencerminkan adanya peningkatan kapasitas produksi riil pada berbagai lapangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus berkembang seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, membaiknya konektivitas antarwilayah, meningkatnya aktivitas perdagangan, serta berkembangnya sektor jasa sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan. Ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif sensitif terhadap perubahan kondisi cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika permintaan pasar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur transportasi, akses logistik, serta kapasitas industri pengolahan masih menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Dalam perspektif pembangunan daerah, laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan PDRB, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*quality growth*) adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, mempersempit kesenjangan